Rakyat Bengkulu

LAPORAN INVESTIGASI SURATKABAR TERBAIK IPMA 2020

SENIN, 16 NOVEMBER | TAHUN 2020 — Pilihan Utama — www.harianrakyatbengkulu.com — TERBIT 16

RELIGIUS: Program Cagub dan Cawagub Bengkulu, Helmi Hasan-Muslihan DS mendapat sambutan luar biasa dari para tokoh agama di Rejang Lebong.

Rejang Lebong Pilih Cagub Makmurkan Rumah Ibadah dan Cinta Hafiz Quran

BENGKULU - Tak dipungkiri, Curup Kabupaten Rejang Lebong salah satu kota sejarah Islam. Nuansa religi masih terasa di daerah ini. Nuansa religius itu sejalan dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu nomor 01, Helmi Hasan dan Muslihan Diding Soetrisno, yang memiliki program 20 Kunci Bahagia Ala Helmi-Muslihan.

Baca **REJANG ..Hal 7**

KEMENANGAN SEMAKIN DEKAT: Semakin mendekati hari pencoblosan Pilgub 9 Desember 2020, dukungan kepada Rohidin-Ronsjonsyah semakin kuat.

Konsep Unik Sejahterakan Petani, Masyarakat Ingin Rohidin Lanjutkan

BENGKULU - Konsep Rohidin-Rosjonsyah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dinilai berbeda dengan yang lain. Petani di Kabupaten Kepahiang menilai, perbedaan konsep itu menjadi daya tarik dan keyakinan masyarakat yang mayoritas bertani, untuk mendukung Cagub Bengkulu bernomor urut 2 di Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Baca **KONSEP ..Hal 7**

Hari Ini Sidang DKPP

Nasib Komisioner KPU Ditentukan

BENGKULU - Nasib kelima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu ditentukan dalam sidang kode etik yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) hari ini. Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto SP M.Si menyampaikan pihaknya akan ikuti proses persidangan itu sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Pertama kita akan mengikuti seluruh mekanisme persidangan etik DKPP, kedua kita berlima akan hadir semua, ketiga kita sudah siapkan jawaban dan alat bukti, keempat kita akan hadirkan saksi-saksi yang sudah kita tetapkan," sampai Eko, kemarin.

Baca **NASIB ..Hal 7**

Sumber : Kementerian Agama

Rp 1,152 T untuk Subsidi Gaji Guru Swasta Disetujui Kemenkeu

Untuk 475 Ribu Lebih Sasaran di Bawah Kemenag

NIZAR

JAKARTA – Kabar baik untuk para guru dan tenaga kependidikan (GTK) non PNS atau swasta di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Baru-baru ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui usulan Rp 1,152 triliun untuk bantuan subsidi gaji.

Sekjen Kemenag Nizar mengatakan persetujuan dari Kemenkeu itu tertanggal 12 November 2020. "Sesuai arahan Menag, kita ajukan usulan untuk bantuan subsidi gaji bagu GTK non PNS," tuturnya kemarin (15/11). Dia bersyukur karena usulan anggaran dari Kemenag sudah disetujui Kemenkeu. Artinya tinggal proses pencairan.

Nizar menegaskan tahap pencarian bisa dijalankan secepatnya. Sebab sebelumnya Kemenag sudah melakukan verifikasi dan validasi kepada 745.415 orang GTK non PNS. Proses tersebut juga meliatkan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca **RP 1,152 T ..Hal 7**

Proses Hampir Satu Dekade, Perjanjian RCEP Resmi Diteken

JAKARTA– Perjanjian di tingkat kawasan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) secara resmi diteken kemarin (15/11). Perjanjian ini sebelumnya melalui proses pembahasan yang cukup panjang. Hampir satu dekade.

Perjanjian tersebut menjadi bagian sejarah penting bagi Indonesia. Sebab republik ini yang menginisiasinya pada saat menjadi ketua ASEAN di 2011 lalu. "Hari ini merupakan hari yang bersejarah. Hari ini kita menandatangani perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP," kata Presiden Joko Widodo dalam pidatonya secara virtual dalam forum KTT ke-4 RCEP di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Presiden yang akrab disapa Jokowi itu bersyukur setelah melalui proses panjang hampir sepuluh tahun, perundingan kerjasama itu akhirnya dapat diselesaikan. Menurut dia semua negara harus merasakan bahwa proses perundingan RCEP bukanlah sesuatu yang mudah.

Meskipun begitu pada akhirnya RCEP tetap bisa diselesaikan berkat komitmen yang kuat terhadap multilateralisme atau kerjasama antarnegara dari negara-negara di kawasan. "Penandatangan ini menandai masih kuatnya komitmen kita terhadap kawasan," jelasnya.

Diantara isi perundingan RCEP adalah komitmen negara-negara di kawasan terhadap prinsip perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan menguntungkan semua pihak. Sehingga bisa memberikan harapan dan optimisme baru bagi pemulihan ekonomi setelah adanya pandemi Covid-19.

RCEP merupakan simbol komitmen pemimpin negara di kawasan terhadap paradigma win-win. Yaitu sebuah paradigma yang mengutamakan kepentingan bersama. Komitmen atas perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan tersebut akan menjadi bagian penting bagi komitmen kawasan terhadap sentralitas ASEAN di kawasan Indo-Pasifik.

Jokowi mengingatkan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama ini hanyalah sebuah permulaan. Setelahnya, negara-negara yang terlibat masih harus berupaya untuk mengimplementasikannya. "Ini juga membutuhkan komitmen politik pada tingkat tertinggi. Bagi Indonesia, kami masih membuka peluang negara di kawasan untuk bergabung dalam RCEP ini," tandasnya.

Di akhir KTT digelar upacara penandatanganan RCEP yang disaksikan masing-masing pemimpin ASEAN dan negara mitra. Seperti Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

Usai pertemuan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membeberkan peran Indonesia dalam penandatanganan RCEP. Ia menyampaikan, bahwa Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam terciptanya zona perdagangan bebas terbesar di dunia tersebut.

"RCEP merupakan inisiatif Indonesia saat menjadi keteua ASEAN dan disepakati pada pertemuan pemimpin ASEAn pada November 2011," katanya. Indonesia kemudian terus mengawal jalannya negosiasi dengan menjadi ketua dari beberapa pembicaraan yang terkait dengan kesepakatan dagang tersebut. perundingan sendiri dimulai pertama kali pada Maret 2013. "RCEP ini diharapkan akan menciptakan kondisi kondusif dan kompetitif bagi ekonomi di kawasan Indo-Pasifik," sambungnya.

Menurutnya, Indonesia masih membuka kesempatan bagi beberapa negara Indo Pasifik untuk bergabung dalam RCPE. **(wan/mia)**

Konsep Unik Sejahterakan Petani, Masyarakat...

Sambungan dari halaman 1

Andi Aris petani yang juga mantan Kades Kabawetan mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Rohidin yang telah memberikan perhatian dengan membangun infrastruktur jalan di wilayahnya. Menurut Andi, infrastruktur sangat bermanfaat untuk mobilitas petani berikut distribusi hasil tani. Selain itu, konsep integrasi pariwisata dan pertanian ala Rohidin yang diterapkan di Kabupaten Kepahiang, mampu memberikan penambahan penghasilan bagi masyarakat.

"Konsepnya unik dan terbukti bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang mayoritas petani. Kita berharap pak Rohidin dan programnya bisa berlanjut, kita pilih nomor dua, tidak akan kemana-mana lagi. Apa lagi ke kandidat yang sudah terbukti korupsi," tegas Andi Aris di Desa Barat Wetan Kepahiang, Sabtu (14 November 2020).

Menurut Aris, pengintegrasian pariwisata dengan pertanian, menjadikan sektor lain juga berkembang. Seperti UMKM, ekonomi kreatif, bahkan perhotelan dan transportasi. Dirinya berharap, pariwisata di kabupaten yang miliki iakon kopi itu, bisa terus berkembang.

Dalam kesempatan berbeda, politisi Partai Demokrat Kabupaten Kepahiang Firdaus Jaelani mengatakan, selain integrasi konsep pariwisata dengan pertanian, Rohidin juga dinilai miliki sebuah strategi pasar yang bakal memberikan efek kesejahteraan untuk petani lebih luas lagi. Artinya, bukan hanya untuk petani di Kepahiang saja namun untuk seluruh petani di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya.

"Sentuhan untuk petani, konsepnya bagus. Jadi tak hanya di tingkat petani saja yang produktivitasnya digenjot. Artinya kualitas hasil tani dan jumlah, kuantitasnya terus ditingkatkan, tapi pasarnya juga digiring agar harga juga meningkat. Kita siap berkolaborasi, dan pilih nomor 2 agar petani kita makin sejahtera," ucap Firdaus yang saat ini turut maju di Pilkada Kabupaten.

Selain alat mesin pertanian, sarana infrastruktur pendukung, petanaha Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah juga menjamin ketersediaan pupuk, baik yang bersubsidi maupun tak bersubsidi. Warga Desa Bumi Sari Kepahiang, Sumino mengatakan, pupuk bagi petani seperti dia, masih terjadi kendala selain saluran irigasi. Dirinya berharap, jaminan ketersediaan pupuk bisa terwujud.

"Semoga pak Rohidin berlanjut. Jalan sudah sangat bagus, tapi petani seperti kami kadang sudah menggarap lahan, ternyata pupuknya susah. Jadi hasilnya kurang bagus. Mudah-mudahan kalau pak Rohidin berlanjut, pengepakan pupuk bisa di Bengkulu saja, biar bisa terus ada pupuknya," demikian harap Sumino yang menyatakan bakal coblos nomer 2 untuk Pilgub Bengkulu 2020.

Usul Perhutanan Sosial Sempat Diprotes, Rohidin Ingin Lindungi Puluhan Ribu Keluarga Bengkulu

Petahana Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memaparkan program kerakyatan untuk periode 2021-2024 dalam kampanye dialogisnya di beberapa desa di Rejang Lebong. Selain 18 program kerakyatan, Rohidin juga menceritakan upayanya melindungi puluhan ribu keluarga petani yang menggarap lahan di kawasan hutan lindung.

"Lebih dari 34 ribu kepala keluarga yang bekerja di kawasan hutan di Provinsi Bengkulu. Bertahun-tahun kejar-kejaran dengan aparat penegak hukum. Saya sampaikan, jangan lagi ditangkap, tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka tidak ada pilihan lain, bahkan ada yang membuka lahan di kawasan hutan itu, sudah berjual rumah di kampung halamannya," cerita Rohidin saat di Rejang Lebong, Minggu (15/11).

Atas kondisi itu, lanjut Rohidin, sebagai gubernur dirinya mendorong dan mengusulkan program perhutanan sosial. Tujuannya agar masyarakat bisa mengelola hutan sembari diberdayakan untuk melakukan konservasi hutan. Provinsi Bengkulu sendiri, wilayahnya tak kurang dari 40 persennya merupakan kawasan hutan.

Dirinya juga bercerita usulan perhutanan sosial di Bengkulu sempat menuai protes dari beberapa pihak. Kendati demikian, dirinya tak gentar lantaran tak ada sedikitpun niat ataupun modus untuk kepentingan pribadi. Namun, murni untuk melindungi warganya dan agar tetap terjaga ekosistem hutan di Bengkulu.

"Sempat diprotes, tapi tidak apa-apa. Boleh dichek, apakah saya punya perusahaan tambang misalnya, atau mungkin saya punya kebun pribadi di kawasan ?, tidak ada. Jadi murni untuk melindungi warga, melindungi saudara-saudara kita. Sampai 2020 ini sudah 53 ribu hektar kini menjadi legal dikelola saudara-saudara kita dari ujung Kaur hingga Mukomuko," ujar putra kelahiran Manna 9 Januari 1970 ini.

Persoalan seperti itu, imbuhnya, haruslah diselesaikan oleh gubernur. Seorang gubernur sejatinya tak hanya sekadar membelanjakan APBD maupun dana lain yang kemudian tak memberikan efek kemajuan ataupun kesejahteraan warganya.

"Kalau sekadar membelanjakan, semua orang bisa. Ada duitnya ada barangnya, belanja selesai. Tapi tidak seperti itu yang dilakukan pemimpin untuk kemajuan daerah," tutup Rohidin, Cagub nomer urut 2 dalam Pilgub Bengkulu 2020.**(**)**

Nasib Komisioner KPU Ditentukan

Sambungan dari halaman 1

DKPP RI akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 119-PKE-DKPP/X/2020 pukul 09.00 WIB hari ini. Komisioner KPU Provinsi Bengkulu diadukan Calon Gubernur Bengkulu nomor urut 3 dalam Pilkada 2020, Agusrin Maryono Najamuddin. Ia memberikan kuasanya kepada Yasrizal SH. Pada perkara nomor 119-PKE-DKPP/X/2020 Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota Provinsi Bengkulu, yaitu Irwan Saputra, Eko Sugianto, Siti Baroroh, Darlinsyah, dan Emex Verzoni.

Terkait hal tersebut, Yasrizal menjelaskan pihaknya juga telah bersiap untuk sidang kode etik itu. Dijelaskannya dalam perkara nomor 119-PKE-DKPP/X/2020 kliennya berdalih bahwa teradu dinilai telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya karena menggunakan Surat Keterangan dengan nomor: W11. PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7267 tertanggal 9 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, sebagai dasar keputusan untuk menyatakan Pengadu tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020-2024.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP. "Pada intinya Kita sudah siapkan saksi dan bukti-bukti," jelas Yasrizal.

Selain aduan terhadap ketua dan Anggota Provinsi Bengkulu itu, Yasrizal menjelaskan bahwa kliennya juga mengadukan Ketua dan Anggota KPU RI, yakni Arief Budiman, Hasyim Asy'ari, Ilham Saputra, Viryan, Pramono Ubaid Tanthowi, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Yakni dengan perkara nomor 124-PKE-DKPP/X/2020.

"Berkaitan dengan adanya surat KPU RI nomor 735 itu, klien kami juga membuat aduan," tambahnya.

Untuk perkara ini, lanjut Yasrizal, kliennya mendalilkan bahwa dengan dikeluarkannya Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, diduga merupakan upaya untuk menjegal Pengadu sebab surat tersebut keluar setelah pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu dibuka KPU Provinsi Bengkulu, diketahui Pengadu merupakan mantan terpidana korupsi yang telah melewati masa tunggu calon sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XVII/2019.

Berkenaan dengan mekanisme sidang tersebut, akan ada majelis dari DKPP RI. Yakni M. Afifuddin, S.TH.I., M.SI. Dr. H. Alfitra Salamm, APU dan Didik Supriyanto, S.IP, MIP. Dimana sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, yang juga dapat disaksikan langsung melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP. **(war)**

Rp 1,152 T untuk Subsidi Gaji Guru Swasta...

Sambungan dari halaman 1

Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) itu berharap dana tersebut segera dicairkan.

Dirjen GTK Kemenag Muhammad Zain menuturkan 745 ribuan GTK non PNS madrasah pengajuan ke Kemenag itu setelah melaliu proses validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Diantara validasi itu untuk melihat apakah calon penerima subsidi gaji dari Kemenag belum menerima program serupa dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Zain bersyukur proses validasi BPJS Ketenagakerjaan berjalan lancar. Proses pengusulan sampai pencairan anggaran bantuan subsidi gaji juga diawasi oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag selaku aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

Dia mengatakan program pemberian subsidi gaji itu harus dikawal dari hulu sampai hilir. "Bantua ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada warganya. Terlebih di tengah pandemi Covid-19," tuturnya.

Sebelumnya jumlah usulan yang dimasukkan Kemenag ke BPJS Ketenagakerjaan untuk divalidasi mencapai 864 ribuan orang GTK. Diantara temuan validasi BPJS Ketenagakerjaan per September 2020 ada 55.242 orang sudah menerima bantuan program Kartu Prakerja. Kemudian ada 43.895 orang menerima bantuan subsidi upah Kemenaker.

Zain juga mengatakan skema pencairan anggarannya nanti mampir dahulu ke Kemenag. Skema ini sesuai dengan arahan dan hasil diskusi dengan tim Staf Khusus Wakil Presiden. Skema ini diambil supaya jelas nantinya siapa yang bertanggung jawab. Menteri Agama selaku pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) adalah para dirjen di Kemenag termasuk Dirjen Pendidikan Islam (Pendis). **(wan)**

Visa Umrah Distop Untuk Evaluasi

Positif Covid-19 Sebanyak 13 Jamaah Masih di Makkah

JAKARTA - Keputusan Arab Saudi menutup kembali penerbitan visa umrah masih jadi misteri. Puluhan ribu calon jamaah umrah yang tertunda, belum bisa dipastikan kapan mereka bisa berangkat ke Makkah.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Oman Fathurrahman bersama tim sampai saat ini masih berada di Makkah. Mereka melakukan pemantauan langsung pelaksanaan umrah. Oman mengatakan masih ada 13 orang jamaah umrah yang masih berada di Makkah. Mereka belum bisa pulang karena masih harus menjalani karantina di hotel.

Oman mengatakan belum mendapatkan kabar pasti alasan Saudi menghentikan pengurusan visa umrah. Sampai akhirnya penerbangan umrah hanya terjadi tiga gelombang saja. "(Visa dihentikan, Red) Untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu atas pelaksanaan umrah yang sudah terlaksana," katanya tadi malam (15/11).

Muncul dugaan bahwa visa umrah dihentikan karena ada jamaah umrah asal Indonesia yang dinyatakan positif Covid-19 di Makkah. Total ada 13 orang yang positif Covid-19. Delapan orang dari gelombang pertama dan lima orang asal gelombang kedua. Sementara untuk gelombang ketiga penerbangan umrah asal Indonesia tidak ditemukan kasus positif Covid-19.

"Saya tentu tidak tahu pertimbangan detailnya (menghentikan visa umrah, Red). Tapi saya kira bukan hanya itu saja alasannya (jamaah Indonesia positif Covid-19, Red)," kata Oman. Dia mengatakan pelaksanaan umrah di tengah pandemi Covid-19 memang berat. Tetapi tugas pemerintah untuk tetap menjalankan fasilitas dan melayani serta melindungi jamaah.

Sementara itu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mengeluarkan surat evaluasi dan rekomendasi penyelenggaraan umrah di tengah pandemi. Dalam surat itu Ketua Umum Amphuri Firman M. Nur menyampaikan rekomendasi pra keberangkatan, saat berada di Saudi, maupun saat kembali ke tanah air.

Diantaranya travel tidak menerima pendaftaraan calon jamaah dengan penyakit penyerta atau komorbid. Mewajibkan jamaah menjalani karantina penuh selama dua hari di hotel kota embarkasi keberangkatan.

Kemudian selama di Saudi, jamaah tidak melanggara turan karantina mandiri di hotel. "Contohnya tidak keluar dari kamar hotel, tidak berkunjung ke kamar lain, dan tidak berkumpul-kumpul dengan jamaah lain," jelasnya. Kemudian saat salat di Masjidilharam jamaah wajib berangkat bersama-sama dengan didampingi petugas atau pembimbing dari muassasah.

Sementara itu Konjen RI Jeddah Eko Hartono mengatakan, pemberhentian penerbitan visa umrah untuk calon jamaah umrah Indonesia bersifat sementara. Hanya sekitar dua minggu. Pasalnya, pada 22 November 2020 nanti, bakal ada rombongan jamaah dari Indonesia yang datang untuk menjalankan ibadah umrah. "Rencananya ada lagi 300-an jamaah Indonesia yang tiba," tuturnya dihubungi, kemarin (15/11).

Dari informasi yang diterima olehnya, penghentian ini hanya diberlakukan untuk Indonesia. Eko sendiri tak berani menduga-duga apakah kebijakan tersebut merupakan dampak dari adanya jamaah yang terdeteksi positif Covid-19. Sebelumnya, memang ada sekitar 13 orang jamah dari rombongan 1 dan 2 di awal November 2020 yang dinyatakan positif setelah diswab PCR di sana.

"Sejauh ini tidak ada info resmi (alasan penyetopan visa umrah sementara, red)," paparnya.

Eko mengatakan, jeda waktu ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh pihak jamaah dan travel agent umrah untuk melakukan pesiapan yang lebih baik. Mengingat adanya jamaah yang tidak jelas hasil PCR-nya dan ketika diswab terdeteksi positif. Sementara jamaah Pakistan seluruhnya negatif. Sehingga, bisa lancar menjalankan rangkaian umrahnya.

Belum lagi, lanjut dia, ketika jamaah umrah pada rombongan awal terpantau melanggar aturan saat menjalani masa karantina. Masih ada yang tidak patuh. Mereka justru keluar hotel. kejadian tersebut pun secara langsung dilaporkan pada pihak Saudi sehingga bisa menjadi catatan buruk untuk jamaah Indonesia.

Disinggung soal hasil PCR dari Indonesia yang dibawah oleh jamaah Indonesia, Eko mengaku kurang paham mengapa hasil bisa berbeda. Ia enggan menerka-nerka mengenai ketepatan pengambilan specimen maupun adanya upaya-upaya nakal terhadap hasil tes PCR. Yang jelas, kata dia, dari penjelasan pihak Saudi, bisa jadi ketika dites di Indonesia gejala belum muncul. namun, ketika tiba di Saudi, gejala sudah ada sehingga langsung terdeteksi.

Ia pun sempat bertanya pada pihak Saudi terkait penunjukan satu laboratorium untuk tes swab PCR para calon jamaah. Karena pasti akan sangat memberatkan calon jamaah yang berada di luar kota. Mengingat, pihak Saudi di Jakarta hanya merekomendasikan pharmalab di Halim Perdanakusuma, Jakarta untuk urusan lab. "Kalau dari daerah kan rempong ya," katanya.

Namun jawaban yang diperoleh dari pihak penyelenggara umrah justru membuatnya terkaget. Ternyata, lokasi tes swab PCR dibebaskan. Tak terpaku pada satu Pharmalab saja. Mereka diperkenankan memilih laboratorium mana saja asal mendapat rekomendasi resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia.

"Saya juga baru dengar dari penyelenggara umroh Saudi. Perlu dicek lagi denga Saudia Jakarta itu," ungkapnya.

Terkait SOP ibadah umrah, Eko membenarkan bila masih berubah-ubah. Hal ini lantaran pihak Saudi masih mencari pola penanganan yang pas dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemic. Mengingat, semuanya merupakan hal baru. "Jadi sekarang setelah datang diswab. Kalau negatif langsung umroh, baru kemudian karantina," papar Eko.

Sementara, bagi yang terdeteksi positif bakal langsung dikarantina. Ia memastikan, semua biaya bakal dicover oleh Saudi sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh dan bebas COvid-19. Lalu, bagaimana jika masa karantina melebihi paketan umrah jamaah hingga membuat jamaah tak bisa ibadah umrah? Menurutnya, mereka nantinya dipersilahkan kembali menjalankan ibadah umrah. Semuanya akan ditanggung alias digratiskan oleh pihak Saudi. "Ditanggung semuanya. Sesuai janji penyelenggara umrah di Saudi," tandasnya. **(wan/mia)**

Rejang Lebong Pilih Cagub Makmurkan...

Sambungan dari halaman 1

Salah satunya, memakmurkan masjid dan rumah ibadah buka 24 jam.

Keduanya, sejak sebelum mencalonkan diri, sudah mencanangkan program ini. Bukan pemimpin yang mendadak karena mendekati pemilihan Gubernur Bengkulu, buru-buru ikutan membuat program peduli masjid. Bagi Imam Masjid Darussalam Curup, Amin Hud, Provinsi Bengkulu harus dipimpin orang yang memakmurkan masjid, seperti yang selama ini sudah dilakukan Helmi Hasan, sejak memimpin sebagai Walikota Bengkulu.

Apa yang sudah dilakukan Helmi Hasan selama menjadi pemimpin, menurut Amin Hud, itu pemimpin yang diidam-idamkan orangtua untuk keberlangsungan bangsa yang bermartabat.

Sehingga moral dan akhlak masyarakat bisa selalu ditanamkan, karena kepedulian pemimpin. Lewat kekuasaan, pemimpin bisa lebih mendekatkan rakyatnya kepada Tuhan dan tempat ibadah.

"Pilih pemimpin yang memakmurkan masjid. Karena pemimpin yang baik, yang mengajak rakyatnya berlomba-lomba kepada kebaikan," ujar Amin Hud, Sabtu (14/11/2020) pagi.

Selain memakmurkan masjid, Amin berharap Helmi Hasan jadi Gubernur Bengkulu agar program 1 desa 1 hafiz Quran bisa segera diwujudkan. "Masjid kami butuh hafiz Quran, sehingga generasi religi terus berkelanjutan. Kita bantu Helmi Hasan lewat doa dan memilih nomor 01 untuk Gubernur Bengkulu," tukas Amin.

Sementara itu, sebelumnya pada hari Jumat (13/11) Helmi Hasan juga menjumpai warga di desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Di sini warga kompak mendukung total calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu nomor 01, Helmi Hasan dan Muslihan Dding Soetrisno.

Di desa ini, setiap rumah memasang stiker nomor 01 Helmi-Muslihan. Tak ayal, ketika Helmi Hasan datang Jumat (13/11/2020) malam, lokasi kampanye di salah satu rumah warga, dipenuhi warga hingga tumpah ke jalan.

"Kami semua di sini memilih Helmi-Muslihan. Karena hanya Helmi-Muslihan yang menawarkan religius dan kebahagiaan. APBD untuk rakyat," ujar warga di Kepala Curup sembari mengacungkan jari telunjuk.

Senada, pemuka agama di wilayah ini, H. Hajar menegaskan warga di desanya menginginkan Helmi Hasan menjadi gubernur.

Ia mengatakan, selama ini warga mereka belum pernah mendapat perhatian dari pemerintah provinsi.

"Baru ini melihat pemimpin mengambilkan nasi untuk rakyat. Saya sendiri tak menyangka nasi yang saya makan ini, diambilkan langsung oleh Helmi Hasan," cerita Hajar yang senang melihat sosok pemimpin pelayan masyarakat seperti Helmi Hasan.

Bagi Hajar, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya program langsung untuk rakyat. Sehingga rakyat termotivasi untuk ikut membangun daerah.

"Lihat Helmi Hasan, dia mau memberi makan untuk rakyat. Tak memandang status. Semoga 20 Kunci Bahagia itu dia wujudkan. Kami selalu doakan untuk beliau menjadi pemimpin kami. Apalagi di Kepala Curup ini, jarang mendapat perhatian di tingkat provinsi," kata Hajar.

Terutama, bagi Hajar, ia salut dengan Helmi Hasan yang membantu anak yatim, janda tua dan lansia. Masyarakat juga dimudahkan dengan bantuan produktif, sehingga ekonomi masyarakat bisa meningkat.

"Pak Helmi membantu masyarakat keluar dari kesusahan ekonomi. Pertanian juga diperhatikan, juga dibantu dengan peternakan. Helmi Hasan Insya Allah Gubernur Bengkulu," doa Hajar. **(**)**

WINDI//RB

DIAMANKAN: Tiga perempuan dan satu pria diamankan tim BNNP Bengkulu, karena saat dilakukan tes urine hasilnya positif.

Empat Pengunjung Kafe Diangkut BNNP

Hasil Tes Urine Positif

BENGKULU - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu, Minggu (15/11) dini hari, kembali melakukan razia di tempat hiburan malam. Sedikitnya ada 10 hiburan malam di Kota Bengkulu yang dirazia.

Dari 10 tempat hiburan malam tersebut anggota BNNP Bengkulu melakukan tes urine kepada pengunjung dan didapati empat pengunjung yang positif mengandung zat narkoba. Hal ini disampaikan Kepala BNNP Bengkulu, Brigjen Pol. Toga H. Panjaitan melalui Kabid Pemberantas, Kombes. Pol. Sukria Gaos.

"Kita melakukan razia ini untuk memberantas peredaran narkotika gelap di Bengkulu, dalam melakukan razia kita tetap menjalankan protokol kesehatan," ujarnya.

Ditambahkan Gaos, dari tes urine yang dilakukan di hiburan malam ada emat orang positif, selanjutnya ke empat orang tersebut langsung diamankan ke Kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lajut. "Dari empat orang yang positif satu orang laki-laki dan tiga orang perempuan," ungkapnya.

Masih dikatakan Gaos dalam razia tersebut ia selaku Kabid Berantas didampingi oleh Kabid Rehabilitasi dan Kabid Pencegahan dan Pemberdayan Masyarakat (P2M). "Kita akan tindak lajuti dan masih kita dalami apakah mereka positif menggunakan sabu atau ekstasi, kalau sudah kita periksa. Selanjutnya nanti apakah mereka akan kita rehabilitasi, kita lihat dulu hasil pemeriksaan lebih lanjut," tutupnya.

Dari pantauan **RB**, pada razia malam itu, petugas BNNP yang berjumlah sekitar 40 orang langsung menuju ke salah satu klub malam. Satu persatu pengunjung tak luput dari pemeriksaan tes urine Minggu (15/11) dini hari, Tidak menutup kemungkinan ke depannya BNNP Provinsi akan melakukan razia rutin dalam pencegahan penyebaran narkotika di Bengkulu.(**wij**)

WINDI//RB

TKP: Aksi pengroyokan terjadi di depan eks terminal Betungan.

Antar Ayam, Warga Babatan Dikeroyok

BENGKULU – Darma (44) warga Desa Babatan Kecamataan Sukaraja Kabupaten Seluma, melapor ke polisi usai dikeroyok empat pria. Dimana salah satu pelakunya dikenal korban berinisial Ri. Peristiwa pengeroyokan terjadi Jumat (13/11) sekitar pukul 01.00 WIB, di depan eks Terminal Betungan Kelurahan Betungan.

Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian kepala, telinga, dan bibir. Diketahui Kejadian berawal korban ke pergi ke TKP bertujuan untuk mengantarkan ayam bangkok kepada salah satu temanya. Tiba-tiba datang pelaku dan langsung memukul kepala korban.

Terkejut, korban langsung melawan. Saat itu tiba-tiba datang lagi teman pelaku yang ikut mengeroyok korban. Salah satu pelaku mengunakan batu, sehingga kepala, telinga dan bibir korban mengalami luka. Tak terima, korban pun melapor ke polisi.

Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes. Pol. Sudarno, S. Sos. MH, membenarkan laporan tersebut. "Laporan sudah kita terima dan penyidik masih mempelajari laporan untuk ditindaklanjuti," pungkasnya. (**wij**)

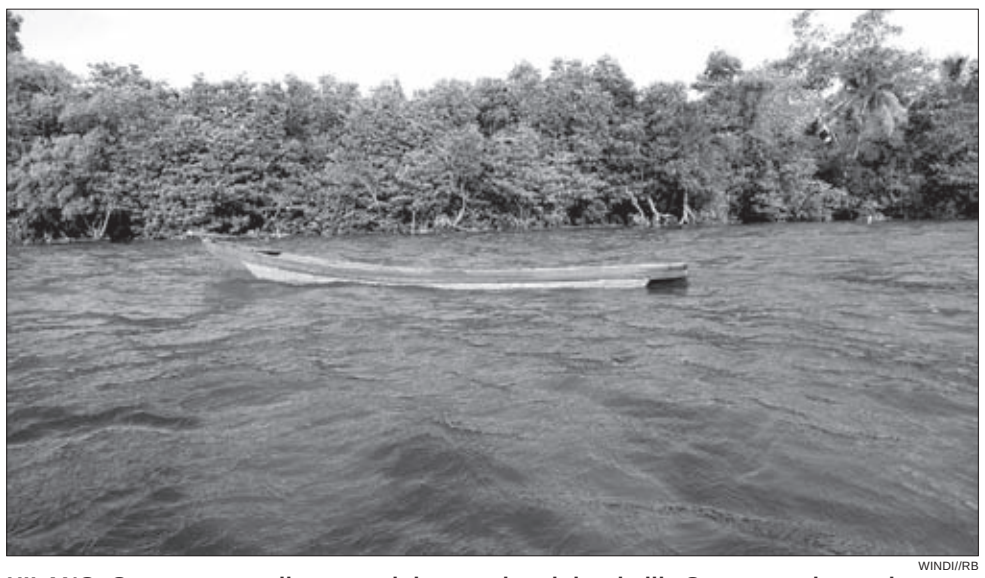

WINDI//RB

HILANG: Sampan yang ditumpangi dua saudara ini terbalik. Seorang selamat dan satu lagi hilang dalam kejadian ini.

Sampan Terbalik, Adik Selamat Kakak Hilang

Mancing Berujung Musibah

BENGKULU – Peristiwa naas menimpa dua saudara kandung kemarin (15/11) sore di Sungai Muara Jenggalu Kelurahan Kandang. Rian warga Kelurahan Pekan Sabtu dan kakaknya, Yos Sudarso warga Kelurahan Bumi Ayu tenggelam setelah sampan yang mereka tumpangi terbalik usai dihantam arus. Dalam kejadian itu, Rian berhasil menyelamatkan diri. Sementara Yos Sudarso hingga tadi malam belum berhasil ditemukan.

Data yang berhasil dihimpun **RB**, kejadian ini berawal saat keduanya pergi memancing menggunakan sampan kayu. Setelah hari mulai sore, keduanya pun memutuskan untuk pulang. Namun saat akan menyeberangi sungai, tiba-tiba arus deras datang dan langsung menghantan sampan kayu yang mereka tumpangi hingga terbalik.

Keduanya pun tercebur ke dalam sungai. "Setelah terbalik saya langsung berenang dan saya masih sempat melihat kakak saya. Waktu itu saya sempat membantu dia, tapi karena arus cukup deras tak bisa saya selamatkan lagi," ungkap Rian.

Kapolres Bengkulu, AKBP. Pahala Simanjuntak, S. IK, melalui Kapolsek Kampung Melayu, Iptu. Surya R. Purnama menyampaikan saat ini anggota dan Basarnas Provinsi Bengkulu sedang melakukan pencarian di lokasi. "Benar, saat ini masih dalam pencarian di lokasi," singkat Surya.

Sementara itu salah seorang tim Regu Pencari Basarnas Provinsi Bengkulu, Almarwan, mengatakan saat ini anggota Basarnas masih melakukan pencarian di tengah air. Jika sudah malam dan gelap maka pihaknya akan tetap berusaha berupaya untuk mencari korban. "Kalau sudah malam kita akan melakukan pencarian menyisir tepi sungai," ujarnya.(**wij**)

Kredit Nunggak, Mobil Ditarik Paksa

BENGKULU - Penarikan paksa mobil karena tunggakan angsuran kembali terjadi di Kota Bengkulu. Kali ini mobil Daihatsu Xenia milik Heri Pradiyanto warga Provinsi Sumatera Selatan, ditarik paksa oleh pihak leasing yang diduga menggunakan jasa ekternal atau *debt collector*.

Peristiwa ini terjadi Sabtu (14/11) siang di Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan, saat korban berencana ingin membeli makanan. Tak terima korban langsung melapor ke Polres Bengkulu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak kepolisian, peristiwa ini berawal saat itu korban berhenti di depan salah satu rumah makan. Saat turun dari mobil, tiba-tiba muncul delapan debt collector yang diduga sudah membuntuti korban.

Saat itu juga, kunci mobil korban dirampas hingga akhirnya terjadi cekcok mulut. Karena kalah jumlahm korban hanya pasrah melihat mobilnya dibawa oleh debt collector tersebut. Salah seorang pemilik warung makan di sekitar TKP, Cahayu (32) mengaku sempat melihat adanya keribtutan itu.

"Saya mendengar mereka ribut mulut, karena orang itu, persisnya saya tidak tahu penyebabnya," pungkasnya.(**wij**)

WINDI//RB

TKP: Di Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan inilah, mobil Daihatsu Xenia milik Heri Pradiyanto warga Provinsi Sumatera Selatan ditarik paksa delapan debt collector.

WINDI//RB

JELASKAN: Manager PT Batavia Prosperindo, Alexander, menjelaskan kronologis penggelapan mobil yang sudah dilaporkannya ke polisi.

Angsuran Macet 11 Bulan, Mobil Kredit Malah Dijual

BENGKULU – Jika selama ini pihak leasing yang di laporkan lantaran merampas paksa mobil yang menunggak kredit, kali ini pihak leasing yang melaporkan salah satu nasabahnya ke polisi. Hal itu dikarenakan mobil yang dikreditkan sudah menunggak 11 bulan. Saat ditelusuri ternyata mobil tersebut sudah dijual ke orang lain.

Kasus ini pun akhirnya dilaporkan Manager PT Batavia Prosperindo, Alexander ke Polres Bengkulu. Dimana terlapornya adalah nasabahnya berinisial Nu (38) warga Kabupaten Bengkulu Utara. Dikonfirmasi **RB** kemarin, Alexander mengatakan, mobil berstatus kredit yang sudah dijual oleh Nu itu adalah mobil Daihatsu pikap BD 9309 Y. Menurutnya tindakan Nu itu tanpa sepengetahuan pihak perusahaan.

Akibat kejadian itu pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar 60 juta rupiah. Dijelaskan Alexander, awalnya Nu membeli mobil Daihatsu pikap kepada pihak perusahaan secara kredit. Namun berjalannya waktu mobil tersebut oleh Nu malah dijual tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Diungkapkan Alexander kasus ini terbongkar setelah, angsuran mobil menunggak. "Setelah angsuran mobil menunggak selama 11 bulan, kita melakukan penagihan, namun kita ditunjukan oleh terlapor ini surat, yang menyatakan kalau mobil tersebut telah dipindahtangankan kepada orang lain bernama Dermawan, tanpa sepengatahuan kita," ungkapnya.

Ditambahkannya sebelumnya Nu sudah diberi surat peringatan pertama untuk menjalankan tugasnya membayar kredit namun tidak diindahkan. "Sebelum kita melaporkan ke polisi kita sudah lakukan tindakan peneguran untuk membayar tetapi itikad baiknya untuk membayar tidak ada, maka kita lakukan penelusuran ternyata mobil sudah dipindahtangankan," ujarnya.(**wij**)

POLING CABUP DAN CAWABUP SELUMA PILIHAN PEMBACA RB

EDISON-KHAIRI

ERWIN-GUSTIANTO

SUPARTO-NOVIAWAN

Usulkan Relokasi Pemukiman Warga

30 Rumah Kembali Terendam

SELUMA - Puluhan rumah warga di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) kembali terendam oleh banjir rob pada Minggu (15/10) malam. Banjir yang disebabkan oleh pasang air laut ini sangat kerap terjadi dan memang menjadi momok yang menghantui warga desa setempat.

Akibat adanya banjir ini, puluhan warga terpaksa melakukan evakuasi barang-barang berharga miliknya. Perangkat Desa Padang Bakung, Tarmizi mengatakan banjir rob kali ini merendam setidaknya 30 rumah warga. Ketinggian air sekitar 50 cm. Dijelaskannya, musibah banjir ini merupakan peristiwa rutin yang terjadi sejak tahun 2016 lalu, dan hingga saat ini belum ada solusinya dari pemerintah. Jika air laut pasang, dipastikan banjir rob akan selalu melanda desa tersebut.

Data terhimpun RB, sejumlah rumah warga juga ada yang mengalami kerusakan parah lantaran terendam genangan air. Menurut Tarmizi, untuk mengatasi masalah ini, pihaknya telah memasukkan proposal untuk relokasi pemukiman penduduk yang telah tergerus air laut dan sering terkena banjir rob. Ia berharap proposal itu dapat dikabulkan oleh Pemkab Seluma.

"Ini peristiwa rutin, sudah bukan hal baru, jadi masyarakat di sini sudah resah. Kami telah memasukkan proposal agar ada relokasi pemukiman," harapnya.

YUDI/RB

TERENDAM: Banjir rob kembali merendam puluhan rumah warga di Desa Padang Bakung, Minggu (15/11).

Ditambahkan salah seorang warga desa, Thamrin, ia berharap pemerintah bisa memberikan solusi jitu dalam mengatasi masalah banjir rob ini. Dimana para warga sudah mulai resah akibat rutinnya banjir yang kerap melanda pemukiman tersebut. "Kami sangat berharap ada solusi untuk mengatasinya," ujarnya.**(cup)**

YUDI/RB

SALURKAN : Penyaluran BLT DD di Desa Gelombang berjalan tertib dan tetap mengikuti protokol kesehatan.

BLT-DD Tahap II Mulai Disalurkan

SELUMA - Sebanyak 182 desa di Kabupaten Seluma diwajibkan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) yang berasal dari dana desa (DD) kepada masyarakat terdampak Covid-19. Dalam periode tahap II ini, selama tiga bulan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp 300 ribu.

Jumlah yang diterima mengalami penurunan dibandingkan BLT DD tahap pertama yang sebesar Rp 600 ribu per bulannya. Dimana saat ini beberapa desa telah mulai melaksanakan penyaluran BLT DD tersebut kepada masyarakatnya yang membutuhkan.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Seluma, Agus Jun Fadhillah mengatakan penyaluran BLT tahap kedua ini dasarnya adalah perubahan yang tercantum dalam PMK Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Salah satu poin krusialnya, penyaluran BLT DD diperpanjang hingga enam bulan. Yakni masyarakat penerima akan mendapatkan bantuan dari DD hingga bulan Desember 2020.

"Diperpanjang jadi 6 bulan, itu ada PMKnya, jadi desa diwajibkan untuk menyalurkan BLT Tahap UU pada KPM di masing-masing desa," jelasnya.

Agus menambahkan dana desa diprioritaskan untuk pelaksanaan penlakuran BLT sehingga pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT DD. Bagi desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan kegiatan ini akan dikenakan sanksi. Ia juga berharap dalam penyaluran ini tidak menimbulkan polemik seperti penyaluran BLT DD tahap I. Agus menekankan agar pemerintah desa dapat lebih teliti dan cermat dalam menyalurkan BLT dengan benar-benar melaksanakan musyawarah dalam menentukan penerimanya. "Ini wajib, sehingga kami harap benar-benar disalurkan sebagaimana peruntukannya," ujarnya.

Salah satu yang telah menyalurkan BLT DD adalah Desa Gelombang yang berada di Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM). Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Desa Gelombang, Hamdan R. Penyaluran BLT DD dilaksanakan di kantor Desa Gelompang. BLT DD tersebut disalurkan kepada 50 Kepala Keluarga (KK) warga Desa Gelombang. "Untuk bulan November ini, kita telah menyalurkan BLT DD," jelasnya.

Ia berharap dengan adanya bantuan yang telah disalurkan tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dia juga mengajak warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Yakni dengan memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.

Hamdan juga mengingatkan kepada warga desanya jika ada keluarga atau pendatang dari zona merah agar segera disampaikan ke pihak terkait. Hal tersebut guna untuk tetap menjaga dan mencegah masuknya Covid- 19 di desa tersebut.

"Kita harap bantuan ini bisa bermanfaat bagi KPM, kita juga mengimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan," ujarnya.**(cup)**

Kenaikan TPP Belum Pasti

SELUMA - Rencana kenaikan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkab Seluma belum ada kepastian. Hasil yang didapati dalam Rapat Banggar pembahasan usulan KUA-PPAS 2021 yang digelar di ruang rapat Sekretriat DPRD Seluma pada Jumat (13/11), masih tak sesuai harapan.

Rencana anggaran untuk TPP pada 2021 sebesar Rp 60 miliar kemungkinan hanya disetujui sebesar Rp 45 miliar saja. Tentunya hal itu mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 lalu, namun mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2020 ini. Anggota DPRD Seluma, Tenno Heika S.Sos MM mengatakan angka sebesar Rp 45 miliar keluar setelah rapat panjang. Dewan juga sudah menerima rincian besaran TPP. Dimana pembayaran TPP harus disesuaikan dengan Anjab dan beban kerja serta disesuaikan dengan tipe OPD.

"Sudah ada gambarannya, jadi dari usulan Rp 60 miliar itu bisa diakomodir sekitar Rp 45 miliar saja," sampai Tenno.

Tenno mengatakan, alasan menurunnya anggaran TPP tersebut dikarenakan skala prioritas yang lebih penting. Yakni Kabupaten Seluma masih membutuhkan anggaran untuk infrastuktur dengan jumlah besar. Hal ini mengingat infrastrukstur Kabupaten Seluma hingga saat ini masih dinilai kurang, sehingga pembangunan lebih dipentingkan. Rencana kenaikan TPP untuk 3.700 ASN yang ada di jajaran Pemkab Seluma terpaksa belum bisa direalisasikan.

"Anggarannya banyak dilarikan untuk infrastruktur, jadi kita utamakan untuk pembangunan dulu," bebernya.

Terpisah, Kepala BPKD Seluma, Marah Halim mengatakan anggaran TPP pada tahun 2019 lalu sebesar Rp 60 miliar. Namun besaran TPP ini menurun drastis tahun 2020 yang hanya dianggarkan sebesar Rp 30 miliar. Pengurangan sebesar 50 persen itu dilakukan untuk alokasi anggaran penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Seluma. Sedangkan untuk anggaran TPP pada tahun 2021 nanti masih belum final. Dimana masih akan ada rapat pembahasan lanjutan terkait besaran total anggaran dalam pembayaran TPP.**(cup)**

Enam Titik Jalan Terancam Putus

SELUMA - Cuaca buruk yang kerap terjadi diwilayah Kabupaten Seluma berdampak pada infrastruktur. Sejumlah titik di ruas jalan wilayah Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma terancam putus karena longsor. Jalan yang terancam longsor dan putus itu diakibat tergerus air.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Seluma merencanakan perehaban tahun 2021 mendatang. Enam titik lokasi jalan yang terancam putus itu berada di ruas jalan Kelurahan Talang Saling menuju wilayah Mandi Angin Kelurahan Napal.

YUDI/RB

LONGSOR: Tanah yang mulai longsor di ruas jalan di wilayah Kelurahan Talang Saling.

Kepala Dinas PUPR Seluma, Muhammad Syaipullah, SE, ST mengatakan banyaknya jalan yang terancam longsor dan putus itu diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Dimana air yang datang melebih kapasitas sehingga membuat tanah berangsur turun atau longsor.

Syaipullah juga menjelaskan melihat kondisi jalan di pusat kota tersebut terancam putus, pihaknya sudah merencakan perehaban. Hanya saja, perehaban itu belum bisa dilakukan secara menyeluruh lantaran terkendala anggaran. Untuk itu, ia akan berkordinasi dengan BPBD, DPRD dan Bappeda Seluma.

Menurutnya, anggaran Dinas PUPR pada tahun 2021 nanti hanya sekitar Rp 57 miliar yang terdiri dari DAK Rp 26 miliar dan APBD Rp 31 miliar. "Tahun depan banyak sekali jalan yang harus diprioritaskan. Namun anggaran terbatas, sehingga minim untuk pembangunan fisik, tapi tetap kita usahakan," ujarnya.

Syaipullah menambahkan Dinas PUPR juga akan meminta pada BPBD Seluma untuk ikut andil dalam mengusulkan anggaran pembangunan insfrastruktur jalan yang terkena bencana. Baik longsor, serta jalan yang diakibatkan bencana banjir. **(cup)**

Hitung Volume Pekerjaan Libatkan Tenaga Ahli

Usut Rehab Gedung Disdik

SELUMA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma terus menggeber penyelidikan kasus dugaan korupsi pada rehab gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Seluma pada tahun 2019 lalu. Setelah melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait, Kejari merencanakan dalam waktu dekat ini akan melakukan koordinasi ke tenaga ahli.

Koordinasi itu dilakukan sebagai salah satu rangkaian dalam penanganan kasus yang saat ini masih ditangani penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Seluma. Kajari Seluma, Muhammad Ali Akbar, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Ahmadi, SH mengatakan tenaga ahli akan dilibatkan untuk melakukan pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan. Mengingat di dalam pelaksanaan perehaban gedung tersebut tidak sesuai prosedur sehingga pekerjaannya mangkrak.

"Iya, untuk melakukan pengukuran dan penghitungan volume pekerjaan," jelasnya.

Sejauh ini sudah ada beberapa pihak terkait yang ikut dalam pekerjaan tersebut dipanggil penyidik. Mulai dari pejabat Disdik, konsultan, kontraktor dan lainnya. Dimana pemanggian itu guna memintai keterangan terkait kasus yang tengah diproses tersebut. Dimana kemungkinan masih ada beberapa pihak terkait lainnya yang akan kembali dipanggil.

"Untuk pemeriksaan dan pemanggilan telah mulai dilakukan, ada beberapa yang sudah. Tidak menutup kemungkinan ke depan masih ada lagi," bebernya.

Diketahui, bangunan Disdik lama sudah tidak bisa dimanfaatkan karena sudah dirobohkan. Seharusnya perusakan aset harus mendapat persetujuan dewan. Saat ini kantor Disdik Seluma juga terancam terbangkalai. Sebab DPRD tidak menyetujui anggaran tambahan perehaban kantor tersebut tahun 2020 yang diusulkan mencapai Rp 2,5 miliar. Sehingga proses pekerjaan gedung hingga saat ini mangrak alias tidak berlanjut.**(cup)**

POLING CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN

PILIHAN PEMBACA RB

HARTAWAN-DARMIN

GUSNAN MULYADI-RIFAI TAJUDDIN

BUDIMAN ISMAUN- HELMI PAMAN

DEWI SARTIKA-MARWAN ISWANDI

TELEPON PENTING

Polres Bengkulu Selatan	08119415565
Kodim 0408 Bengkulu Selatan	081277771999
Telkom	(0739) 21070
UGD RSUD Damrah Manna	(0739) 2118
PLN Ranting Manna	(0739) 123
Pemadam Bahaya Kebakaran	(0739) 23141

LINTAS

RIO/RB

BEBAS: Tampak hewan ternak masih bebas berkeliaran dibeberapa kecamatan Bengkulu Selatan

Perdes Mandul di Kecamatan

KOTA MANNA – Peraturan Desa (Perdes) hewan ternak di 11 Kecamatan Bengkulu Selatan (BS) saat ini kurang berjalan dengan baik. Terbukti, masih banyaknya hewan ternak yang bebas berkeliaran di jalanan dan membuat pengendara yang melintas resah.

Meskipun Pemkab BS telah melakukan sosialisasi ke 11 Kecamatan hingga ke desa, namun nyatanya Perdes hewan ternak tidak berjalan dengan baik. Bahkan rata-rata desa saat ini tidak menjalankan Perdes herwan ternak yang telah disosialisasikan oleh pihak pemerintah daerah.

Padahal apabila Perdes hewan ternak berjalan dengan baik, maka program Pemkab BS yakni memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami tumbuhan akan sangat baik. Namun nyatanya hingga saat ini masih banyak desa yang membuat Perdes tersebut terbilang mandul atau tidak berjalan.

Untuk di Kecamatan Pino hingga Ulu Manna masih banyak ditemukan hewan ternak yang tidak dikandangkan oleh pemiliknya. Begitupun di wilayah Pino Raya dan juga Kedurang. Ditambah lagi Kecamatan Manna masih didapati hewan ternak bebas di tengah jalan.

Sementara untuk kecamatan Seginim, Bungamas dan Air Nipis Perdes tersebut telah berjalan baik. Ini disebabkan mayoritas desa telah menjalan dengan baik Perdes itu.

Menyikapi hal ini, Kepala Satpol PP BS Erwin Muchsin, S.Sos mengaku, apabila Perdes tidak berjalan baik, maka kinerja pihak kecamatan dipertanyakan. Sebab jelas Erwin Perdes hewan ternak disosialisasikan langsung oleh pihak kecamatan bersama desa dan dibantu Satpol PP.

Sementara tugas utama Satpol PP sebut Erwin menertibkan, pihak Kecamatan yang tidak mampu mensosialisasikan dengan baik soal Perdes bisa meminta bantuan Satpol PP untuk menertibkan hewan ternak yang masih bebas berkeliaran.

"Silahkan lapor ke Satpol PP apabila butuh untuk penertiban," ujar Erwin.**(tek)**

RIO/RB

SALURKAN: Saat petugas membagikan BLT Kelurahan beberapa waktu lalu. Minggu ini BLT Kelurahan akan kembali disalurkan Pemkab Bengkulu Selatan.

Minggu Ini, BLT Kelurahan Kembali Dicairkan

KOTA MANNA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga Kelurahan di Bengkulu Selatan (BS) belum sepenuhnya disalurkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) BS. Untuk itu, Dinsos menjanjikan dalam minggu ini BLT Kelurahan kembali dicairkan ke masyarakat kelurahan BS.

Kepala Dinsos BS Didi Ruslan, M.Si saat dikonfirmasi membenarkan bahwa BLT Kelurahan belum sepenuhnya tersalurkan pada warga. Adapun penyebab BLT Kelurahan selama bulan September dan Oktober belum disalurkan lantaran beberapa faktor. Disebutkan Didi, belum disalurkannya BLT September dan untuk Oktober untuk warga Kelurahan, pertama BLT yang disalurkan melalui BRI. Namun lantaran pihak bank mengalami kendala lantaran Covid-19 akhirnya penyaluran BLT periode September dan Oktober tertunda.

Sedangkan kendala kedua yakni pihak Dinsos masih melakukan perbaikan data warga penerima BLT. Didi menyebutkan perbaikan data tersebut membutuhkan waktu.

Kendati demikian, Didi mengklaim dalam minggu ini juga BLT untuk warga Kelurahan akan kembali disalurkan. "Ada beberapa kendala namun dalam Minggu ini dicairkan, untuk penyaluran belum pasti berapa bulan," jelas Didi.

Belum disalurkannya BLT Kelurahan saat ini menjadi pertanyaan masyarakat BS. Bahkan pihak DPRD BS juga mendesak agar Dinsos segera mencairkan BLT tersebut.

Seperti dikatakan Waka II DPRD BS Dendi Man Tarmizi, SH, SE dia meminta penyaluran BLT dilakukan secepatnya. Sebab bantuan tersebut jela Dendi sangat berarti bagi warga Keluarahan yang juga terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu Dinsos diminta cepat menyalurkan BLT itu.

"Warga sudah banyak yang menanyakan jadi Dinsos segera salurkan BLT itu, jangan buat masyarakat menunggu lama," ujar Dendi.**(tek)**

RIO/RB

PENGAMANAN: Pihak Polres Bengkulu Selatan sedang mengatur skema pengamanan jalannya debat Paslon bupati dan wakil bupati

Pendukung Bisa Nonton di Posko

KOTA MANNA – Hari ini (16/11) KPU Bengkulu Selatan (BS) berkerjasama dengan RBTV melaksanakan jalannya debat empat Paslon bupati dan wakil bupati di hotel Seven Onem Jalan Veteran, Kota Manna yang disiarkan secara live.

Namun demikian KPU BS tetap membatasi jumlah peserta yang dibolehkan masuk dalam arena debat lantaran masih dalam pandemi Covid-19. Dikatakan Komisioner KPU BS Aspriantoni, SE yang bisa masuk arena debat hanya Paslon dan tim Paslon serta awak media yang melakukan peliputan. Sedangkan untuk masa pendukung masing-masing pendukung paslon, Aspriantoni menyampaikan tidak diperbolehkan berkumpul di sekitar hotel apalagi sampai masuk arena debat.

Agar masyarakat tetap bisa menyaksikan jalannya debat, KPU BS berkerjasama dengan RBTV, dimana selama proses debat, mayarakat BS dapat menonton melalui chanel RBTV.

"Masa pendukung tidak boleh berkerumun, silahkan saksikan debat di posko masing-masing," ujar Aspriantoni.

Aspriantoni mengakui, ini dilakukan sesuai dengan peraturan KPU. Oleh sebab itu pihaknya menyarakan masyarakat BS tidak mendatangi lokasi debat.

Diketahui, untuk debat Paslon bupati dan wakil bupati BS diikuti empat Paslon yakni no urut satu Hartawan-Darmin, no urut dua Budiman Ismaun-Helmi Paman, no urut tiga Gusnan Mulyadi-Rifai dan no urut empat Dewi Sartika-Marwan Iswandi.

Sementara itu untuk mengamankan jalannya proses debat, pihak kepolisian, , TNI dan juga aparat Satpol PP menjaga ketat lokasi debat.

Disampaikan Kapolres BS AKBP. Deddy Nata, S.IK pihaknya tidak akan memberikan ruang sedikitpun bagi oknum yang mencoba menggangu jalannya tahapan Pilkada. Untuk itu pihaknya selalu berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan juga pemanggku kepentingan di BS.

"Untuk penjagaan akan ditingkatkan, lokasi debat steril dari apapun. Tidak boleh ada yang menggangu," tegas Kapolres.**(tek)**

Antar Sabu ke BS, PNS Kota Bengkulu Dibekuk

KOTA MANNA – Berbagai cara dan modus dilakukan pengedar narkoba tetap saja bisa dicium oleh petugas kepolisian. Terbaru seorang pria inisial MU (56) yang juga seorang PNS di Kota Bengkulu berhasil dibekuk Satnarkoba Polres Bengkulu Selatan (BS) saat membawa dua paket Narkotika jenis sabu.

MU diamankan anggota Opsnal Satnarkoba Polres BS saat MU melintas di jalan Desa Selali, Kecamatan Pino Raya Sabtu (14/11) pukul 23.00 WIB. Kapolres BS AKBP. Deddy Nata, S.IK melalui Kasat Narkoba Iptu. Welliwanto Malau, S.IK, MH menceritakan, pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang membawa narkotika diduga jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor yang akan masuk BS.

Berdasarkan info tersebut anggota Opsnal Sat Resnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian, kemudian pukul 23.00 WIB anggota Opsnal Satnarkoba berhasil melakukan penangkapan tehadap MU.

Dalam penggeledahan pada MU didapati 2 paket Narkotika jenis sabu- yang terbungkus plastik bening dan dibungkus plastik warna hitam yang dibungkus lagi dengan menggunakan uang kertas Rp 2 ribu terletak di tanah di pinggir jalan dekat dengan pelaku. Saat itu juga MU langsung diamankan di bawah ke Mapolres BS.

"Ya MU ini diduga mau mengantar paket sabu ke BS. Dan belum sampai diedarkan MU lebih dulu diamankan, status MU memang PNS," jelas Malau.

Saat ini, MU telah diamankan ke Mapolres guna penyidikan oleh Satnarkoba. Selain itu Satnarkoba masih akan mengembangkan kasus MU. Sebab Malau menduga, banyak komplotan MU yang belum terungkap.

"Masih dikembangkan lagi, karena ini tidak mungkin satu orang," tutup Malau.**(tek)**

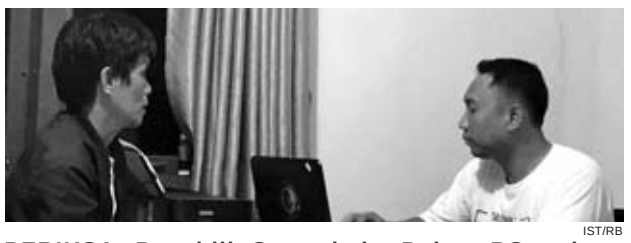

IST/RB

PERIKSA: Penyidik Satnarkoba Polres BS sedang memeriksa MU terduga pengedar sabu.

391 PTPS Siap Jalankan Tugas

KOTA MANNA - Bawaslu Bengkulu Selatan (BS) secara resmi telah mengumumkan 391 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk ditempatkan di setiap TPS di 11 Kecamatan BS. Bahkan Bawaslu menegaskan 391 PTPS siap jalankan tugas dengan baik.

Adapun tugas PTPS adalah mengawasi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara, dan mengawasi pergerakan hasil perhitungan suara dari TPS ke PPS.

Disebutkan Ketua Bawaslu BS Azes Digusti, S.Kom kewenangan PTPS adalah menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Selain itu tambahnya, PTPS juga dilarang untuk mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya, mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara, mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

"Sebelum berkerja PTPS ini diberikan bimtek, jadi dipastikan paham aturan dan siap jalankan tugas dengan baik," terang Azes.

Sedangkan untuk pelaksanaan Bimtek dan lainnya, Azes menerangkan setelah selesai pelantikan 391 PTPS yang akan dilaksanakan (16/11).

"Tunggu selesai pelantikan baru Bimtek, dalam Bimtek nanti PTPS ini diberikan penjelasan aturan dan juga tugas lainnya," jelas Azes.**(tek)**

TPG Belum Juga Cair

Dananya Sudah di Kasda

KOTA BINTUHAN – Dana tunjangan sertifikasi triwulan ketiga tahun 2020, sebesar Rp 8,7 miliar sampai saat ini belum juga direalisasikan. Padahal, dana tersebut sudah ada di kas daerah (Kasda) sejak awal November lalu. Kepada **RB**, Kepala BKD Kaur Alian Suhadi melalui Kabid Anggaran Irpilisisman mengatakan, TPG akan segera dibagi dalam waktu dekat ini. Saat ini, BKD masih menunggu pengajuan pencairan dana tersebut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. Yang merupakan syarat utama pencairan TPG tersebut. Termasuk juga usulan pencairan tunjangan non sertifikasi triwulan ketiga. "Untuk dana non sertifikasi dan sertifikasi sudah siap dan sudah ada kita tinggal menunggu pengajuan dari Dispendik Kaur. Karena dana sertifikasi sekitar Rp 8,7 miliar sudah siap dan tinggal kita luncurkan saja," terangnya.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kaur Endy Yulizar mengatakan saat ini pencairan tunjangan sertifikasi belum diajukan ke BKD Kaur. Karena masih ada beberapa guru yang belum melengkapi berkas dan juga terkait BPJS guru. Namun pihaknya memastikan kalau pengajuan akan segera dilakukan. Sehingga akhir November 2020 nantinya pencairan sertifikasi tuntas.

"Untuk saat ini sudah siap kita ajukan dan mungkin minggu ini sudah kita ajukan ke BKD Kaur usulan pencairan tunjangan sertifikasi. Setelah itu baru kita ajukan non sertifikasi sehingga semua tuntas akhir bulan ini harapan kita," pungkas Kepala Dinas Pendidikan Kaur Endy Yulizar.

Penerima tunjangan sertifikasi guru tahun 2020 triwulan ketiga sebanyak 659 guru. Terdiri dari guru Paud atau TK, guru SD serta guru SMP. Tidak hanya itu saja dari jumlah itu juga terdapat pengawas sekolah yang dapat tunjangan sertifikasi. (**cik**)

Lintas

ALBERTUS/RB

BELI: Pembeli kelapa yang siap turun ke kebun memanen dan mengupas kelapa.

Harga Kelapa Mulai Naik

KOTA BINTUHAN – Permintaan buah kelapa tua dari Jakarta saat ini terus meningkat. Berapapun stok kelapa milik petani diborong oleh penampung. Seiring dengan peningkatan permintaan itu, harga kelapapun mulai naik. Jika sebelumnya Rp 3 ribu hingga Rp 3.200 per buah, saat ini naik menjadi Rp 3.400 per buahnya. Diperkirakan harga kelapa ini akan terus naik.

Naiknya permintaan buah kelapa saat ini berbanding terbalik dengan jumlah kebun kelapa yang terus berkurang setiap tahunnya. Apalagi dengan masuknya usaha tambak udang, ratusan hektare kebun kelapa di Kaur ditebang untuk tambak budidaya.

"Untuk saat ini harga buah kelapa kita jual Rp 3.400 per buahnya dan ini naik kalau sebelumnya kita terima bisa Rp 3 ribu per buahnya di kebun. Dan penampung siap ambil berapa saja buah kelapa kalau ada, mereka ingin ekspor ke Jakarta," kata salah satu pemilik kebun kelapa di Pengubaian, Kiki.

Tidak hanya itu saja, para pengusaha kelapa yang biasanya bisa mendapatkan kepala di Kaur saat ini harus berkeliling untuk memenuhi kontrak ekspor kelapa setiap bulannya. Karena saat ini stok buah kelapa di Kaur tidak seperti 10 tahun yang lalu yang masih sangat banyak. Bahkan Bengkulu, hanya Kaur yang paling banyak kebun kelapa. Namun saat ini banyak para toke kelapa mencari buah di wilayah Krui Lampung dan sekitarnya.

"Buah kelapa di Kaur untuk saat ini tidak bisa mencukupi kebutuhan per bulannya untuk ekspor ke Jakarta. Karena pemainnya sudah banyak, kemudian kebunnya terus berkurang jadi selain mendapatkan buah di Kaur kita juga harus mencari ke wilayah Lampung dan daerah lainnya di Bengkulu. Dan kedepannya potensi kebun kelapa pasti akan sangat menjanjikan," ungkap salah satu toke kelapa Kaur – Lampung, Darus. Saat ini para pengumpul kelapa tidak hanya menerima kelapa dari pemiliknya seperti dulu. Namun mereka sudah mencari pelanggan hingga ke kebun. Bahkan mereka juga menyiapkan petugas khusus untuk memanjat dan mengupas kelapa. Hal ini terpaksa dilakukan jika ingin mendapatkan pelanggan, jika tidak maka tidak bisa mendapatkan stok buah kelapa yang banyak. (**cik**)

IST/RB

CARI: Tim saat mencari korban tenggelam di Wayhawang Kecamatan Maje kemarin.

Selamat Setelah Berenang dari Tengah Laut

2 Korban Belum Ditemukan

KOTA BINTUHAN – Aski (17) pelajar SMK Merpas, berhasil selamat dalam musibah perahu tenggelam di pantai Desa Wayhawang Kecamatan Maje, Minggu (15/11) pukul 04.00 WIB. Menyadari dirinya tercebur kelaut bersama perahu yang ditumpanginya, dengan sekuat tenaga dia berenang menuju bibir pantai yang berjarak 100 meter. Tuhan berkehendak, Aski pun berhasil sampai ke tepi pantai. Walaupun dalam keadaan sudah lemas kelelahan.

Namun, dua temannya yang lain, yakni Lengki (20) dan Imam (17) pelajar SMP, tak mampu berenang ke tepi. Sehingga akhirnya terseret arus. Hingga berita ini diturunkan, tim Tim gabungan dari TNI, Polri, Basarnas dan juga BPBD Kaur bersama Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono, S.IK, MH masih berada di lokasi melakukan pencarian dua korban yang belum ditemukan tersebut. Karena kondisi gelombang yang tinggi, pencarian dilanjutkan pagi ini (16/11).

Kepada polisi korban selamat Aski mengaku kalau dirinya dan kedua rekannya Minggu dini hari pukul 03.00 WIB menggunakan sampan pergi melaut. Saat itu, gelombang tinggi, air laut masuk ke perahu mereka dan tenggelam. Sehingga mereka pun meloncat dari perahu berenang menuju ke pantai. "Pada saat itu kami semua loncat dan terpisah ada satu teman yang ikut di belakang saya pak setelah itu tidak terlihat lagi," ungkap Aski kepada polisi dari Polsek Maje kemarin.

Tim berusaha mencari keberadaan korban, bersama warga dan nelayan namun usaha itu hingga kemarin malam belum membuahkan hasil. "Tiga korban ini mau mancing namun saat sudah di tengah gelombang tinggi dan kapal pun tenggelam sehingga mereka tenggelam. Satu selamat dua lagi terseret arus dan masih dalam pencarian. Untuk tim dari TNI, Polri, BPBD dan juga masyarakat, nelayan sudah turun untuk mencari korban di tengah laut," ungkap Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono, S.IK, MH melalui Kapolsek Maje Iptu Cahya P Tuhuteru kemarin.

Mendapati kejadian ini, pasangan calon bupati Kaur Gusril Fauzi dan Medi Yuliardi bersama rombongan langsung ke rumah duka tidak hanya itu saja langsung ke TKP dan memantau pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan. Tidak hanya Gusril, calon bupati Kaur lainnya Lismidianto juga mengunjungi keluarga korban pasca kejadian kemarin.

"Sampai malam ini informasi di lapangan mereka berdua yang hilang belum ditemukan dan warga masih mencari di pinggir pantai. Kita berharap keduanya bisa ditemukan segera, karena besok (hari ini red) pencarian akan terus dilanjutkan," ungkap Kades Linau Kecamatan Maje Agus kepada RB malam tadi. (**cik**)

Ditinggal Nyadap, Rumah Terbakar

IST/RB

TERBAKAR: Tim dari Polsek Pagulu saat cek rumah yang terbakar di Naga Rantai kemarin.

KOTA BINTUHAN – Malang nasib Juni Harlitahadiah (32) warga Desa Naga Rantai Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Rumahnya terbakar kemarin (15/11) sekitar pukul 10.00 WIB, saat dia pergi menyadap karet di kebun. Akibat kejadian itu berbagai perabotan berharga seperti TV tempat tidur dan lainnya ludes terbakar. Beruntung kejadian ini sempat diketahui warga, sehingga masih ada barang yang bisa diselamatkan. Sementara bagian dalam rumah sudah hangus terbakar, bahkan api sudah merambat hingga ke atap rumah korban. Akibat kejadian ini korban pun mengalami kerugian kurang lebih Rp 20 juta. Kuat dugaan kebakaran yang terjadi kemarin akibat korsleting listrik hal ini terlihat dari bekas terbakar yang berada di dekat lokasi TV. Saat kejadian rumah dalam kondisi kosong. Suami korban sedang membuka kebun di wilayah Jambi.

Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono, S.IK, MH melalui Kapolsek Padang Guci Hulu Iptu Samsul Rizal membenarkan kejadian tersebut. Bahkan pihaknya menduga kalau kebakaran kali ini bukan dari tempat masak namun berasal dari ruang TV. Sehingga diduga kuat kejadian karena korsleting listrik. Pada saat kejadian menurut Kapolsek, korban sedang berada di kebun karet dan beruntung warga bergerak cepat sehingga rumah tidak sampai rata dengan tanah.

"Untuk kebakaran kali ini hanya rumah yang terbakar untuk korban luka dan jiwa tidak ada karena pada saat kebakaran rumah dalam kondisi kosong. Kejadian pukul 09.30 WIB dan baru dapat kita padamkan bersama warga sekitar pukul 10.20 WIB. Pemadaman kita lakukan secara sederhana dengan menggunakan peralatan yang ada," pungkas Kapolsek Pagulu Iptu. Samsul Rizal.

Mengetahui rumah korban terbakar sejak kemarin siang para kerabat korban berdatangan ke rumah duka dan melihat langsung kondisi rumah tersebut. Tidak hanya itu saja, calon bupati Kaur Gusril Fauzi kemarin juga menyempatkan hadir ke lokasi dan melihat kondisi korban. Dengan kejadian ini rumah tersebut tidak bisa dipergunakan lagi oleh korban, karena sebagian kayu kusen dan atap sudah hangus terbakar dilalap si jago merah.

"Dengan kejadian ini kita himbau warga untuk waspada, karena walau musim hujan kejadian kebakaran bisa saja terjadi. Untuk kita imbau sebelum pergi warga kita minta waspadai listrik dan kompor atau tungku tempat masak. Karena dapat menyebabkan terjadinya kebakaran," pungkas Kapolsek Pagulu. (**cik**)

Musim Hujan, Lubang Jalan Berbahaya

KOTA BINTUHAN – Musim hujan, lubang jalan akan sangat berbahaya bagi pengendara, lantaran tertutupi air. Tentu saja ini sangat membahayakan pengendara. Untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, Sat Lantas Polres Kaur saat ini mulai melakukan pengecekan sejumlah jalan yang berlubang. Beberapa lubang jalan juga mulai ditutupi secara swadaya oleh warga dengan koral dan semen.

Lubang jalan yang ditambal sulam warga itu, tidak akan bertahan lama. Apalagi jika terus dilindasi oleh mobil bermuatan berat.

"Kita sudah pantau saat ini jalan berlubang penyebab laka lantas kembali banyak di sepanjang jalan lintas di wilayah Kecamatan Kaur Selatan, Tetap dan sebagainya. Kita sudah melakukan pengecekan ada sebagian yang ditutup oleh warga namun banyak yang belum. Untuk itu kita imbau pengendara khususnya sepeda motor untuk waspada apalagi kalau melintas saat hujan. Karena sudah banyak laporan yang masuk ke kita terkait keluhan jalan berlubang saat ini karena musim hujan," kata Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono, S.IK, MH didampingi Kasat Lantas Iptu. Agus Antoni melalui Kanit Dikyasa Aipda. Agung Dendi Irawan.

Tidak hanya itu saja, jalan-jalan berlubang ini nantinya akan disampaikan ke OPD terkait agar diperbaiki. Tidak hanya lobang jalan yang harus diwaspadai, termasuk banyaknya ternak yang berkeliaran di jalan juga bisa menjadi penyebab kecelakaan.

"Untuk lubang jalan ini akan kita sampaikan ke OPD terkait untuk ditindak lanjuti karena sangat membahayakan. Termasuk juga ternak yang masih banyak berkeliaran di jalan lintas saat ini juga banyak yang menjadi penyebab laka lantas di Kaur saat ini," pungkas Agung Dendi Irawan.(**cik**)

POLING CABUP DAN CAWABUP BENGKULU UTARA PILIHAN PEMBACA RB

Ir. H. Mian
Arie Septia Adinata

BU Ajukan Terima 200 P3K

Gaji Rp 1,7 - Rp 6,7 Juta/Bulan

ARGA MAKMUR – Selain mengajukan CPNS dalam tes umum tahun depan, Pemkab Bengkulu Utara (BU) juga mengajukan 200 tenaga Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal ini sesuai dengan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberday Manusia (BKPSM) Drs. Setyo Budi Raharjo, M.Pd menuturkan jika tahun depan Kemenpan-RB membuka dua perekrutan pegawai masing-masing CPNS dan P3K. Sehingga Pemkab BU mengajukan sesuai kebutuhan dan tidak melebihi jumlah PNS yang pensiun di tahun yang sama.

"Kita mengajukan 200 orang. semuanya tenaga fungsional yang memang disyaratkan untuk diajukan tersebut. Diantaranya tenaga guru, kesehatan dan pegawai di Kecamatan dan Dinas," terangnya.

Namun Pemkab BU masih menunggu kepastian teknis terkait dengan pelaksanaan tes P3K. Apakah tesnya dilaksanakan serentak dengan pola yang sama atau memang dilaksanakan terpisah dengan pola tes yang berbeda dengan CPNS.

"Nanti itu dibahas setelah memang ada formasi. Namun kini kita mengajukan, kita menunggu berapa yang memang disetujui untuk direkrut," ujarnya.

Ia menegaskan jika P3K berbeda dengan tenaga kontrak yang selama ini ada di Pemkab BU. Meskipun memang berdasarkan surat kontrak dengan Bupati, P3K juga mendapatkan standar gaji khusus yang diatur dengan Peraturan Presiden.

"Hanya saja memang pembayarannya ditanggung oleh APBD, sehingga disesuaikan dengan kemampuan APBD masing-masing daerah. Berbeda dengan CPNS yang dibayar langsung APBN," pungkas Budi.

Sekadar mengetahui, dalam Perpres 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan P3K. P3K bukan hanya mendapatkan gaji namun juga mendapatkan tunjangan keluarga.

Selain itu, haji dibagi dalam 17 kelompok dengan empat klasifikasi golongan. Terkecil adalah golongan 1 Kelompok 1 dengan masa kerja 0 hari atau baru dilantik minimal mendapatkan gaji Rp 1,7 juta. Sedangkan tertinggi adalah Golongan IV kelompok XVII dengan masa kerja sebesar Rp 6,7 Juta perbulan.

"Hanya saja nantinya setiap tahun atau lima tahun akan ada kontrak kerja dan harus diperpanjang. Jika tidak diperpanjang artinya yang bersangkutan dianggap mundur," ujar Budi. **(qia)**

Kantor Pertanahan Juga Dipanggil Polisi

PT PDU Dilaporkan Warga

ARGA MAKMUR – Polres Bengkulu Utara (BU) masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan laporan Saul Alim warga Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau. Ia melaporkan perkebunan Kelapa Sawit PT Purnawira Dharma Upaya (PDU), terkait dugaan perusakan dan penyerobotan lahan mililnya setidaknya sejak 1990 lalu.

Dalam keterangannya, Saul menujukan bukti sertifikat yang dimilikinya sejak 2018 lalu. Ia sempat memprotes saat lahannya diambil oleh PT PDU, namun PT PDU saat itu mengaku jika kawasan tersebut masuk dalam kawasan HGU perusahaan.

Namun saat Saul mengajukan berkas pengajuan penerbitan sertifikat, ternyata lahan miliknya tidak masuk dalam kawasan HGU yang tertuang dalam sertifikat HGU perusahaan. Hal ini yang menguatkannya dan menjadikannya dasar dalam melakukan laporan.

Ia melaporkan lantaran tanaman tumbuh miliknya di atas lahan tersebut yang ditebang oleh PT PDU. Termasuk selama bertahun-tahun ia tidak bisa menguasai lahan miliknya tersebut.

Kapolres BU AKBP. Anton Setyo Hartanto, S.IK, MH melalui Kasat Reskrim AKP. Jery S Nainggolan, S.IK menuturkan jika polisi saat ini masih dalam melakukan klarifikasi ke semua pihak yang terkait dengan laporan. Baik itu pelapor, terlapor termasuk saksi-saksi yang terkait.

"Karena saat ini kita masih melakukan pencarian bukti terkait laporan tersebut dengan mengklarifikasi semua pihak," terangnya.

Ia juga tak menampik jika Polisi akan mengundang pihak Kantor Pertanahan terkait permasalahan ini. Polisi ingin mengetahui jelas terkait dengan lahan bersertifikat yang dimiliki pelapor dan lahan HGU perusahaan yang juga dibuktikan dengan sertifikat HGU.

"Karena memang kita ingin mengetahui lahan yang menjadi objek sengketa tersebut. Sehingga nantinya pihak Kantor Pertanahan kita akan undang untuk memberikan keterangan," pungkas Kasat. **(qia)**

IST/RB

BAGI: Warga terlihat mengambil BST beberapa waktu lalu.

Tahun Depan 16 Ribu Warga Masih Berpeluang Terima BST

Pekan Ini Diputuskan

ARGA MAKMUR – Sebanyak 16 ribu warga Bengkulu Utara (BU) yang menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun ini masih berpeluang akan kembali mendapatkan tahun depan. Hal ini jika memang Kementerian Sosial memperpanjang pelaksanaan BST hingga tahun depan layaknya program-program lain terkait dengan Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN).

Kadis Sosial BU Suwanto, M.Ap menuturkan pekan ini ada rakor terkait dengan program BST yang sudah dijalankan dan digelar Kementerian Sosial. Dalam rakor tersebut juga membahas apakah memungkinkan program BST akan dilanjutkan 2021.

"Dalam agenda rakor tersebut akan ada kepastian, apakah memang rakor tersebut menutup program di 2020 atau dilanjutkan di 2021," terangnya.

Dalam rakor nanti dipastikan Pemkab BU akan mengajukan untuk melanjutkan program BST di 2021. Sehingga 16 ribu masyarakat BU yang saat ini menerima BST kembali bisa mendapatkan program tersebut tahun depan dengan minimal besaran Rp 300 ribu seperti pembayaran tahap dua saat ini.

"Namun nantinya tentu Kementerian ada pertimbangan. Namun kita berharap tetap dilanjutkan," terangnya.

BU juga memiliki alasan meminta program tersebut dilanjutkan. Minimal karena saat ini Covid-19 masih berlangsung dan dampaknya termasuk dampak ekonomi juga masih dirasakan masyarakat. Terutama mereka yang bekerja di sektor swasta yang kini masih terdampak Covid-19 dengan aktifitas perusahaannya belum kembali pulih.

"Karena memang program ini sangat membantu dan sangat dibutuhkan masyarakat. Minimal untuk membantu perekonomian keluarga," terangnya.

Kemarin 16 ribu masyarakat menerima BST tahap VII di kantor Pos masing-masing kecamatan. Mereka menerima masing-masing Rp 300 ribu perbulan. tersisa satu tahapan lagi dan akan dibayarkan Desember mendatang.

"Jika sesuai aturan reguler pertama, pembayaran sampai Desember nanti. Artinya tinggal satu tahap lagi. Namun jika memang jadi diperpanjang tahun depan, kita akan melihat regulasi apakah memang dengan penerima yang sama atau memang harus dilakukan pendataan ulang," pungkas Suwanto. **(qia)**

KBM Tatap Muka Dimulai Januari 2021

ARGA MAKMUR – Dinas Pendidikan Bengkulu Utara (BU) sudah memeprpanjang masa belajar dalam jaringan atau online bagi siswa SD dan SMP di BU. Hal ini terkait dengan Pandemi Covid-19 dan kini BU berstatus zona orange penyebaran Covid-19.

Jika dilihat dari perubahan status dan kondisi penularan kasus Corona yang saat ini di BU makin meluas. Paling cepat ada perubahan status zona orang ke zona kuning Desember mendatang. belum lagi adanya prediksi jika kasus akan bertambah saat pemungutan suara 9 Desember mendatang.

Sekolah baru bisa melakukan belajar tatap muka jika BU berstatus zona kuning atau zona hijau.

Kadis Pendidikan Dr. Agus Haryanto, MM menuturkan jika saat ini Dispendik memperpanjang masa belajar daring lantaran penyebaran Covid-19. Apalagi saat ini cluster penyebaran Covid-19 juga sudah meluas ke dunia pendidikan.

"Kita mendapatkan laporan dari Satgas, jika sudah ada kasus positif yang berstatus guru dan pelajar terjangkit corona. Selain memang zona orange tidak diperbolehkan melakukan tatap muka," terangnya.

Saat ini Dispendik menyarankan seluruh guru untuk aktif melakukan pendampingan belajar pada siswa secara daring. Sehingga memang siswa bisa tetap mendapatkan materi ajar sesuai dengan kurikulum dan tetap menjaga penyebaran Covid-19.

"Karena kita berpatokan dengan SKB empat menteri terkait pola pembelajaran dimasa Pandemi Covid-19. Untuk zona merah dan orange belum diperbolehkan melakukan belajar dengan tatap muka," terangnya.

Ia juga berharap seluruh sekolah tetap memantau aktifitas anak. Sehingga anak tidak melakukan aktifitas di luar rumah yang bisa menambah kasus Covid-19.

"Kita berharap Covid-19 ini bisa segera diatasi dan kita bisa kembali lagi ke sekolah. Namun saat ini yang terpenting menjaga kesehatan seluruh dunia pendidikan," imbuh Agus. **(qia)**

Anggota Dewan Sembuh Covid

BU Urutan Kelima Daerah Terbanyak Positif Corona

ARGA MAKMUR – Setelah empat bulan berhasil menekan angka penyebaran Covid-19, dalam sebulan ini jumlah kasus Covid-19 di Bengkulu Utara (BU) terus meningkat. Bahkan dalam satu bulan ada penambahan 50 kasus lebih yang merupakan warga BU terkonfirmasi Positif Covid-19.

Saat ini BU menjadi daerah kelima tertinggi penyebaran Covid-19. Terbesar tetap Kota Bengkulu sebanyak 734 kasus Corona, kedua dan ketiga masing-masing Rejang Lebong dengan 256 Kasus dan Kepahiang 102. Keempat adalah Mukomuko dengan 80 kasus yang hanya selisih empat kasus dari BU di peringkat kelima dengan 76 kasus Positif Covid-19.

76 kasus tersebut dari penambahan tiga kasus Sabtu lalu. Kemarin tidak ada penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Saat ini total 76 kasus terkonfirmasi Covid-19 dengan 40 kasus masih terkonfirmasi positif, 36 orang sembuh dan dua kasus meninggal.

Ini artinya jumlah aksus yang positif saat ini hanya selisih tipis dengan kasus yang sembuh dan meninggal.

Sementara itu, Mantan Ketua yang kini menjabat Anggota DPRD BU Aliantor Harahap, SE sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19. Ia sempat dinyatakan positif usai perjalanan Dinas ke Padang Sumbar dan sempat dirawat di rumah sakit.

"Untuk satu kasus berisial AH warga Putri Hijau saat ini sudah dinyatakan sembuh. Jadi tidak dilakukan perawatan lagi di rumah sakit," terangnya.

Ia menuturkan jika saat ini klaster penyebaran Covid-19 sudah sangat meluas di BU. Sehingga memang sangat rentan terjadi penularan jika memang masyarakat tidak patuh pada protokol kesehatan, terutama dalam beraktifitas di luar rumah.

"Karena hampir dilini seluruh aktifitas masyarakat sudah ada cluster penyebaran Covid-19. Makanya saat ini kita sangat kedepankan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan," terangnnya.

Selain wajib mengikuti protokol kesehatan. Satgas Covid-19 juga terus melakukan disinfecsi pada tempat umum, kawasan pemukiman hingga perkantoran. Terutama yang memang sudah ada kasus positif Covid-19.

"Harapan kita ada penurunan kasus dan peningkatan jumlah aksus sembuh dengan makin tertibnya masyarakat," terangnya. **(qia)**

Iklan Mini BERDAYA MAKSI

SPACE IKLAN
SUDAH LAKU
SPACE IKLAN
SUDAH LAKU
SPACE IKLAN
SUDAH LAKU

DIKONTRAKAN SATU RUMAH
Alamat: Jl. Iskandar, Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bkl.
Fasilitas:
- 3 kmr Tdr, 1 toilet, Teras Blk, R. Dapur, R. Tamu, R. Klurga, R. Cuci Jemur dan R.Makan.
- AC, lemari baju, tmpt tdr, kursi tmu, kulkas, meja mkn, Jet PAM, listrik 1300 wat.

Harga 19 JT NEGO
Minat Hub. 081977004862 / 08117315116

CV WIRA JAYA COMPUTER

Menjual Dan Menyediakan Rental Dan Sewa Laptop Dan Pc Computer, Jumlah Unit Banyak.
Alamat : Jl. Meranti Raya, Sawah Lebar, Hubungi :
082186132771/081367379494
s/d 14 Nov'20

Poling Pasangan
Cagub-Cawagub & Cabup-Cawabup
Pilihan Pembaca RB

Dukung Pasangan Cagub-Cawagub dan pasangan Cabup-Cawabup Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara dan Mukomuko.
periode 2021-2026 pilihan Anda

Pasangan Cagub-Cawagub :

Pasangan Cabup-Cawabup :

IDENTITAS PENGIRIM
Nama :
No HP :
Alamat :

Kirim guntingan formulir ini ke Graha Pena RB Jalan P Natadirja Km 7,5 Kota Bengkulu.
Dilengkapi dengan fotocopy KTP

Penggunaan Sirekap Harus Tetap Maksimal

JAKARTA – Sistem informasi rekapitulasi (sirekap) telah disepakati tidak menjadi basis penghitungan resmi hasil pilkada 2020. Meski demikian, KPU diharapkan tetap memaksimalkan penggunaannya sebagai alat bantu publikasi.

Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengatakan, penggunaan sirekap tidak boleh asal-asalan. "Dikerjakan buru-buru, dinanti-nanti saja, salah-salah sedikit tidak masalah, jangan sampai seperti itu," ujarnya dalam diskusi virtual kemarin (15/11).

Jika dipraktikkan secara serius, lanjut Hadar, penggunaan sirekap akan dapat menemukan persoalan riil di lapangan. Itu bisa dijadikan bahan masukan sebelum sirekap benar-benar digunakan sebagai pengganti rekapitulasi manual sekaligus membangun trust di masyarakat.

Hadar mengingatkan, polemik sistem informasi penghitungan suara (situng) di Pemilu 2019 tidak boleh terulang. Kala itu, kesalahan input situng dipolitisasi untuk mendelegitimasi hasil pemilu. "Sirekap kalau nggak serius justru bisa ikut mengganggu," tuturnya.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby menambahkan, penyelenggara perlu menyiapkan petugas yang kompeten. Sosialisasi ke masyarakat harus diperbanyak. Sebab, menurut dia, politisasi situng pada 2019 terjadi akibat minimnya sosialisasi. "Orang menganggap situng dijadikan hasil final, padahal bukan," ucapnya.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menyebutkan, pihaknya telah menyampaikan ke jajaran bahwa sirekap menjadi informasi pembanding. Jika terdapat upaya manipulasi dalam rekapitulasi manual, ada sirekap sebagai pembanding. "Ini jadi bahan kontrol," katanya. KPU juga berupaya meminimalkan kesalahan dalam penggunaan sirekap dengan memperbanyak bimbingan teknis.

Selain itu, buku panduan dan petunjuk teknis sudah didistribusikan ke daerah. "Kami siapkan video tutorial penggunaan sirekap. Bisa diputar ulang untuk cepat memahami," jelasnya. KPU juga merencanakan dua kali pelatihan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Yakni, pada 28 November dan 5 Desember.

Sementara itu, Bawaslu bakal mengawasi sirekap dalam tiga dimensi. Pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan memetakan berbagai potensi persoalan. "Misalnya, memetakan jaringan internet," terang anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin. **(far/c18/byu)**

PAN Usul PT Tetap 4 Persen

JAKARTA – Sikap Partai-partai masih berbeda soal parliamentary threshold (PT). PAN mengusulkan agar PT tetap berada di angka 4 persen. Tidak menjadi 7 persen seperti usulan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Alasannya, angka tersebut baru diterapkan satu kali dan perlu dievaluasi sebelum dilakukan perubahan.

Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi. Menurut Viva, PT 7 persen bakal mempersulit partai politik dan memperkecil peluang parpol untuk bisa masuk ke legislatif.

Dengan ambang batas 4 persen saja, pada pemilu 2019 lalu hanya 9 parpol yang berhasil masuk ke Senayan. "Menurut PAN, apakah adanya sepuluh partai politik yang lolos di DPR terlalu banyak? Apakah sistem multipartai di era politik modern telah menyebabkan instabilitas politik?" jelasnya.

Bila ada usulan untuk menaikkan parliamentary threshold, lanjut dia, harus ada kajian ilmiah yang mendasari. Kajian itu juga harus bisa diuji secara akademis dan objektif. Bagaimanapun, kenaikan 3 persen tidak bisa dianggap kecil atau enteng.

Viva juga menilai bahwa jumlah partai politik yang masuk ke DPR tidak menjadi jaminan politik akan stabil atau tidak. Alih-alih jumlah, Viva menegaskan, stabilitas politik bergantung pada ideologi politik yang dianut parpol di DPR. Kendati ada banyak parpol, dia meyakini partai-partai yang ada tetap berpegang pada ideologi yang sama, yakni Pancasila.

"Saat ini, partai politik memiliki ideologi yang menjadi ciri khasnya, tetapi perbedaan ideologi partai tidak dalam posisi berlawanan atau diametral," lanjut Viva. Sebab, perbedaan itu disatukan Pancasila dan komitmen berkebangsaan. **(deb/c13/byu)**

Info Bawaslu

IST/RB

BIMTEK: Bawaslu Provinsi Bengkulu menggelar bimtek RKA-K/L.

Gelar Bimtek RKA-K/L

BENGKULU - Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui Divisi SDM dan Organisasi Sub-Bagian Perencanaan Keuangan dan BMN menggelar Bimbingan Teknis Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu. Bimtek dilaksanakan di Hotel Santika, 12 - 14 November 2020.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu, Lopian Hidayat, SE, M.Si menyampaikan pentingnya esensi kegiatan bimtek tersebut mengingat selama ini operator SAKTI hanya satu orang saja di provinsi. Hal itu tentu sangat berat mengingat banyaknya data yang harus diinput dalam waktu yang singkat.

"Kegiatan ini seharusnya sudah dilaksanakan dari jauh hari, akan tetapi karena kita menunggu jawaban dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Kanwil Perbendaharaan untuk izin user SAKTI. Karena user tersebut hanya ada satu di provinsi maka akan sangat berat jika dilakukan hanya di provinsi. Setelah ada izin, user akan berdasarkan kabupaten/kota yang memiliki dana hibah. Sementara itu yang melakukan input di user SAKTI adalah staf operator di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota," kata Lopian ketika meresmikan Bimtek tersebut.

Untuk Pengawas TPS, Bawaslu RI sudah menginstruksikan untuk melakukan bimtek dan rapid test masing-masing sebanyak dua kali. Sementara itu dengan adanya perubahan kebijakan dari Bawaslu RI, saat ini Bawaslu belum bisa melakukan rapat dengan pemerintah daerah. Sementara hal tersebut sangat berkaitan dengan isi dari NPHD, yang mana apabila ada perubahan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Lopian juga berharap untuk penggunaan dana hibah jangan sampai menumpuk. Jika sudah bisa maka langsung di SP2HL agar penyerapan anggaran bisa optimal di Tahun Anggaran 2020.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut menghadirkan tiga orang narasumber diantaranya, Prasetya Arif dan Wulan Puma Deviana dari Kantor Wilayah DJPb serta Andri Ferindra dari Kantor KPPN Bengkulu. Peserta dalam kegiatan berasal dari Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu terdiri atas Ketua, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan satu orang staf pengelola keuangan. Kegiatan berlangsung selama 3 hari dan ditutup langsung Kepala Bagian Administrasi, Drs. Masnuni Sabtu (14/11). **(**)**

Rakyat Bengkulu

METROPOLIS

SENIN 16 NOVEMBER | TAHUN 2020 | HALAMAN 9

Teras

Capai 1.403 Kasus Covid

BENGKULU - Kerumunan tanpa menerapkan protokol kesehatan, menjadi indikasi kuat untuk penyebaran Covid-19. Ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu, H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes.

☞Baca ***CAPAI..*** Hal 15

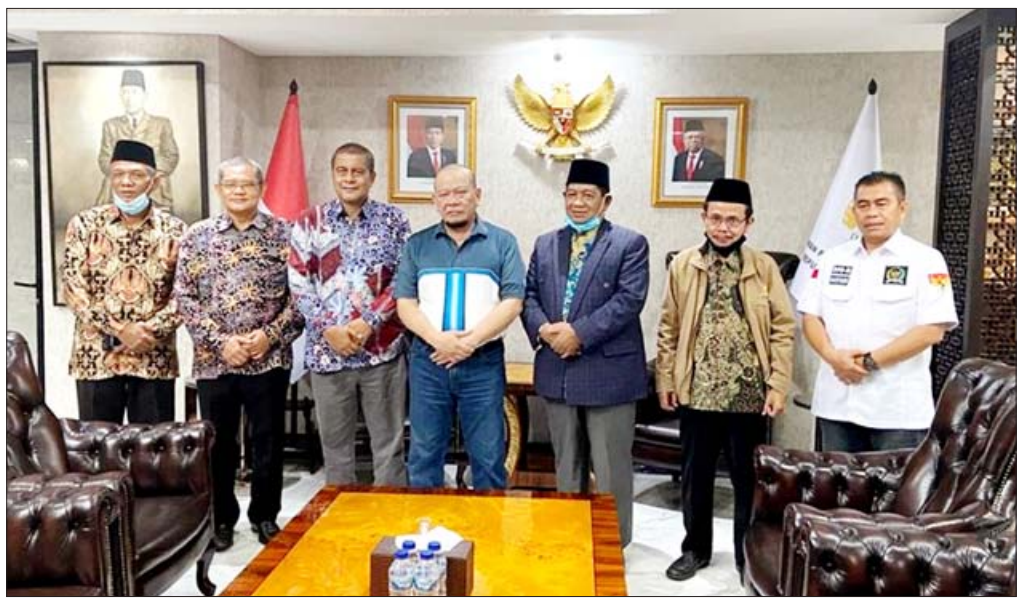

RIKO//RB

KUNJUNGI: Rektor IAIN Bengkulu bersama rombongan saat berkunjung di kediaman Ketua DPD RI membahas percepatan alih status IAIN menjadi UIN.

Presiden RI Keluarkan Izin Prakarsa Transformasi UIN

Rektor IAIN Temui Ketua DPD RI

BENGKULU – Proses panjang dalam upaya peningkatan status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu sampai pada tahap pemberian izin prakarsa oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo. Ini artinya selangkah lagi Provinsi Bengkulu resmi mempunyai Universitas Islam Negeri pertamanya.

☞Baca ***PRESIDEN..*** Hal 15

Serapan Anggaran Baru 50 Persen

Karnadi: Kita Masih Mengejar

BENGKULU – Hingga triwulan ke III, serapan anggaran APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu masih rendah, yakni baru sekitar 50 persen. Hal ini, disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat belanja APBD menjadi lamban dan program kerja OPD banyak terkendala pelaksananya.

Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Kota Bengkulu, Karnadi mengakui hal itu. Dikatakannya, pencapaian tersebut sebenarnya tidak terlalu mengecewakan karena kondisi yang memang cukup sulit di tengah pandemi Covid-19, karena banyak terjadi perubahan anggaran ditengah perjalanan. Namun dia mengklaim masih ada kesempatan untuk mengejarnya serapan tersebut

"Itu capaian triwulan ketiga, kita masih mengejar ketertinggalan serapan di triwulan keempat," ujarnya.

Meski demikian, Karnadi mengatakan tetap optimis serapan anggaran bisa mencapai 100 persen hingga akhir tahun. Sebab, sejak APBD Perubahan 2020 sudah disahkan beberapa waktu lalu, saat ini masing-masing OPD sedang melakukan proses realisasi anggaran sesuai usulannya. "Saat ini program masih berjalan jadi kita tunggu saja, evaluasi nya nanti," terangnya.

Terkait OPD mana saja yang daya serap anggarannya terendah, ia belum mau membeberkannya, dengan alasan saat ini yang diutamakan bukan hanya serapan anggaran saja, melainkan juga diimbangi dengan capaian kinerja. Dari hasil evaluasi beberapa waktu lalu capaian kinerja masing-masing OPD cukup baik.

"Untuk datanya sudah kita sampaikan sebagai laporan ke pimpinan, terkait capaian anggaran dan kinerjanya," sampainya.

☞Baca ***SERAPAN..*** Hal 15

RIRIS/ RB

PERMOHONAN: Beberapa petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu yang bersiap melakukan pelayanan terhadap permohonan paspor

Masa Pandemi, Pemohon Paspor Meningkat

BENGKULU - Dengan dibukanya pelayanan penerbitan paspor beberapa waktu yang lalu, grafis pergerakan penerbitan paspor tercatat dinamis. Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Bengkulu, Samsu Rizal menyebutkan sejak Juli lalu, hingga Oktober ini, tercatat ratusan paspor telah diterbitkan.

Dan pada Oktober ini, jumlah permohonan penerbitan paspor mengalami peningkatan, bila dibandingkan beberapa bulan ke belakang. "Sejak dibuka setelah pandemi, paling banyak permohonan penerbitan itu pada Oktober ini, sebanyak 233 paspor. Ini jumlahnya meningkat ya," kata Samsu, kemarin.

Dijelaskannya, pihaknya telah menerbitkan sebanyak 219 paspor, pada Juli lalu. Dengan rincian 164 paspor baru dan 55 paspor penggantian. Sementara bulan Agustus, pihaknya juga menerbitkan 136 paspor, yang 90 paspor baru, dan 46 paspor pergantian. Kemudian untuk bulan September ada sebanyak 172 paspor, dimana 133 paspor baru dan 39 paspor pergantian. Dan Oktober lalu, tercatat 233 paspor yang diterbitkan, dengan 172 paspor baru dan 61 paspor pergantian.

"Memang ada dua model yang kita berikan layanan itu. Untuk penerbitan paspor, ini juga yang menyebabkan peningkatan permohonan penerbitan," jelas Samsu.

Dua model pelayanan itu, lanjut Samsu, diantaranya layanan simpatik dari inisiatif kantor imigrasi yang berkerja sama dengan pemerintah daerah. Untuk menjemput bola, yang mengutamakan daerah daerah yang potensi permohonannya tinggi. Dan berkaitan dengan jumlah permohonan penerbitan paspor, pihaknya tidak membatasi.

"Kemudian model yang kedua, kemudahan yang diberikan terhadap komunitas, maupun perusahaan atau kantor pemerintah. Dengan memberikan surat permohonan ke imigrasi, dengan jumlah minimal permohonan itu 50 orang," tukasnya.

Ditambahkan Kepala Seksi Lalu lintas Keimigrasian (Kasi Lantaskim), Gunawan bahwa untuk pelayanan paspor semenjak wabah Covid-19 ini, sementara diberhentikan. Sehingga beberapa bulan terakhir, penerbitan paspor hanya diberlakukan untuk kondisi emergency. Kendati demikian, pada Oktober ini jumlah permohonan penerbitan paspor kembali mengalami peningkatan pasca pandemi Covid-19 ini.

"Kalau easy paspor itu kemudahan yang diberikan untuk penerbitan paspor. Serta ada layanan simpatik tadi, inisiatif dari kantor imigrasi untuk jemput bola, memberikan pelayanan di sana," kata Gunawan.

Ia menjelaskan untuk durasi penerbitan paspor paling lama adalah 3 hari. Ini untuk pelayanan biasa, dengan biaya permohonan normal itu hanya Rp 350ribu per permohonan penerbitan paspor.

"Ada juga yang one day servis namun ada biaya PNBP nya, itu langsung di langsung dibayar oleh pemohon ke negara. Selain pembayaran 350ribu itu ya," jelasnya.

Untuk diketahui, sejak adanya wabah pandemi Covid-19 ini, kantor imigrasi Kelas I Bengkulu menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan ketat. Seperti pengecekan suhu badan, fasilitas mencuci tangan, dan penyemprot disenfektan. Hal ini sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid-19.(**war**)

Capai 1.403 Kasus Covid

Sambungan dari hal 9

Bahkan untuk kasus konfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Bengkulu sampai dengan kemarin (15/11) telah mencapai angka 1.403 kasus. Untuk itu, pihaknya terus melakukan tracing kasus. Ini bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir untuk jumlah penambahan kasus berada di angka puluhan.

"Hari ini (kemarin, red) ada 11 kasus, kita imbau agar selalu patuhi protokol kesehatan, ini antisipasi awal paparan Covid-19. Apalagi di tengah keramaian," kata Herwan, kemarin.

Selain itu, ia juga menyampaikan untuk proges kesembuhan pasien Covid-19 diangka 71,74 persen dari jumlah kasus konfirmasi. Untuk saat ini, kasus yang dinyatakan sembuh itu mencapai 1.010 orang. "Untuk pasien sembuh itu ada tambahan 13 orang, ini progres yang baik," tambahnya.

Sementara itu, sampai saat ini untuk pasien positif Covid-19 yang dinyatakan meninggal tercatat sebanyak 56 orang atau 4,53 persen dari keseluruhan jumlah kasus konfirmasi. Untuk itu, pihaknya menghimbau agar semua selalu menjaga kebersihan diri memang harus dilakukan pada pandemi Covid-19 ini. Apalagi saat berada di luar rumah, mengingat saat ini di Provinsi Bengkulu, masih mengalami penambahan kasus konfirmasi positif, meskipun bukan angka yang signifikan. Minimal dengan penggunaan masker dan mencuci tangan sesering mungkin.

"Ini perilaku yang simpel ya, dengan cuci tangan pakai sabun. Ini dapat meminimalisir penyebaran virus," imbau Herwan.

Dikatakannya, mengingat mobilitas di luar rumah sangat tinggi, sehingga rentan akan penyebaran Covid-19. Apalagi dengan intensitas bertemu dengan banyak orang pun tinggi. Ia menyarankan apabila diharuskan berada di luar rumah dalam waktu yang cukup lama. "Maka sebaiknya memiliki peralatan cuci tangan, atau minimal hand sanitizer di dalam tas. Juga masker harus diganti maksimal 4 jam pemakaian," tutup Herwan.

Terkait dengan kerumunan, di Kota Bengkulu sendiri dari bulan lalu mulai banyak peristiwa nikah yang terjadi. Kepala Kantor Kemenag Kota Bengkulu Drs. H. Ramedlon, M.Pd melalui Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Bengkulu, H. Rolly Gunawan, menyampaikan selama tiga bulan lalu, yakni Juli, Agustus, September ada peningkatan jumlah calon pengantin di Kota Bengkulu. Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya mengingat ada pandemi Covid-19 di kota Bengkulu. "Bulan Juli ini ada 174 pasang, Agustus ada 357 pasang, dan September sebanyak 232 pasang," sampai Rolly.

Dikatakannya, meskipun sudah diperbolehkan melaksanakan pesta. Untuk merayakan pernikahan, ia mengimbau agar masyarakat mengindahkan protokol kesehatan. Hal ini untuk menghindari terjadinya klaster baru dari paparan virus yang berasal dari China tersebut. "Jangan sampai, ada klaster baru ya. Apalagi di pesta pernikahan. Untuk itu, jaga jarak dan protokol kesehatan wajib dilaksanakan," tutupnya. (**war**)

Presiden RI Keluarkan Izin Prakarsa ...

Sambungan dari hal 9

Diketahui izin prakarsa ini diserahkan langsung oleh Sekretariat Negara RI, kepada Rektor IAIN Bengkulu Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH kamismalam (12/11) lalu, yang disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Agama RI. Dengan diperolehnya izin prakarsa ini, tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Setelah Perpres keluar IAIN Bengkulu sudah resmi menjadi UIN Fatmawati.

"Izin Prakarsa memberikan waktu 14 hari kerja untuk menyelesaikan Peraturan Presiden tentang alih status menjadi UIN. Dalam artian 14 hari kedepan jika tidak ada halang merintang, Perpres akan keluar, dan kita sudah resmi menjadi UIN," ujar Prof. Sirajuddin.

Sementara itu, setelah menerima Izin Prakarsa, Jumat (13/11) Rektor melakukan pertemuan dengan Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitt imembahas 6 IAIN yang akan bertransformasi menjadi UIN. Prof. Sirajuddin mengatakan Ketua DPD RI akan hadir di Bengkulu saat nanti peresmian UIN Fatmawati.

"Pertemuan dengan Ketua DPD RI ini membahas berkaitan dengan percepatan alih status menjadi UIN. Setelah menerima izin prakarsa kita diskusikan lagi dengan pak La Nyalla. InshaAllah beliau nanti akan hadir di Bengkulu dalam peresmian nanti" demikian Prof. Sirajuddin.(**rko/prw**)

Serapan Anggaran Baru 50 Persen

Sambungan dari hal 9

Ditambahkannya, dengan sisa waktu hingga akhir Desember 2020, ia berharap agar OPD dapat memaksimalkan capaian target, terlebih lagi akhir tahun mendatang sudah dijadwalkan cuti bersama secara nasional sehingga sisa waktu kurang dari 2 bulan. Ia juga meminta agar OPD yang dapat melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan Aparat Pengawsa Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penggunaan anggaran agar tidak terjadi persoalan hukum dikemudian hari.(**juu**)

Desak Tertibkan Taman Pasir Putih

BENGKULU – Kondisi Taman Pasir Putih Pantai Panjang yang semrawut, karena banyak pedagang kaki lima (PKL) yang menguasi area taman, menarik perhatian anggota DPRD Kota Bengkulu. Wakil II DPRD Kota Bengkulu, Marliadi mengatakan koridor-koridor untuk pedagang berjualan di taman sudah dibuat agar rapih dan tidak terjadi semrawut. Tempat pedagang berjualan juga dibatasi tujuannya agar tidak kumuh.

"Pedagang yang berjulan di taman agar segera dilakukan penertiban sehingga taman itu tetap rapih, jangan dibiarkan pedagang berjualan di taman," ujarnya.

Dia mengatakan, jika berdasar kontrak sewa auning tidak boleh disewakan ulang ke pihak lain, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus memberi sanksi kepada pedagang yang melakukannya. Dan apalagi tempat berjualan PKL tersebut tidak di bagian auning yang telah disediakan. (**juu**)

TIRTA DHARMA
LAYANAN SMS
PDAM
KOTA BENGKULU
Menghimbau pelanggan PDAM Kota Bengkulu membayar tagihan sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari sanksi hingga pemutusan.
Menghimbau melakukan pembayaran pada LOKET RESMI untuk menghindari penipuan.
UNTUK KELUHAN LAYANAN (HANYA SMS)
Mohon SMS kan ke 0821 8613 4569 sbb:
a. Nama /No.SL Pelanggan
b. Alamat lengkap dan nomor Hp
c. Laporan /keluhan
Mohon informasi ini disampaikan kepada pelanggan yang lain
"Kepuasan Pelanggan Komitmen Kami"

Melihat Hasil Karya Penyandang Disabilitas

Pemasaran jadi Kendala, Akses Terbatas

Keterbatasan fisik bukan menjadi hambatan bagi seseorang berkarya. Termasuk juga untuk para penyandang disabilitas. Salah satunya, Nurhafiza, remaja tunarungu dan tuna wicara yang memiliki usaha membuat pernak pernik hijab dan konektor masker. Simak Beritanya.

JIAFNI RISMAWARNI, Kota Bengkulu

RIRIS/RB

PENGRAJIN: Salah satu pengrajin konektor masker, Nurhafiza sedang merangkai manik manik

EKA Kurnia, ibu dari Nurhafiza mengatakan putrinya ini memang memiliki kegemaran untuk membuat karya dari manik manik. Kemampuannya ini, didapat dari komunitas disabilitas yang ada di kota Bengkulu. Apalagi saat pandemi Covid-19 ini, munculah ide untuk membuat konektor masker, pasalnya untuk permintaan barang itu cukup banyak.

"Setelah lulus sekolah, yang ini kesehariannya. Alhamdulillah, dapat rejeki dari sini. Memang sejak corona ini, agak sulit untuk jualnya," sampai Eka.

Jauh sebelum Pandemi Covid-19 ini, diakui Eka, untuk melakukan pemasaran dari karya putri itu memang sulit. Apalagi dengan maraknya saingan pasar, yang banyak juga menjual barang serupa. Juga di Bengkulu sendiri, belum ada tempat khusus yang menampung hasil karya dari para penyandang disabilitas. "Kita kan terbatas ya, ini juga selain dijual langsung. Kami tawarkan juga di online. Tapi ya gitu, kadang tawaran pembeli itu jauh, dari modal," jelas Eka.

Inilah yang membuat sulit dalam pemasaran korektor hijab karya putrinya itu. Diakui Eka, tidak hanya Nurhafiza, namun teman-teman disabilitas yang lain memang mengalami hal yang sama. Untuk itu, ia berharap agar ke depannya, dapat memberikan ruang bagi para penyandang disabilitas, untuk mengekspresikan skillnya. Ia berharap agar ke depannya pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih para penyandang disabilitas.

Ketua Mitra Masyarakat Inklusif (MMI) Provinsi Bengkulu, Irna Riza Yuliastuty bahwa memang untuk memasarkan produk dari para disabilitas ini, kebanyakan secara mandiri. Karena produksi sendiri masih home made, dan belum punya galeri sendiri. Selain itu, untuk penjualan, juga ada beberapa yang menjual lewat medsosnya. Karena setelah adanya pandemi Covid-19 ini, tempat usahanya itu tidak diperbolehkan untuk dalam kondisi banyak orang atau ramai. (**)

PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK PASAR TRADISIONAL PROVINSI BENGKULU

Surya Ofiana, SE. M.Si
Pth Kadis Perindag Provinsi Bengkulu

	KOMODITI		SATUAN	HARGA (RP.)	KETERANGAN
1	BERAS	- IR 64 (Lokal Lampung)	kg	10.000	
		- IR 64 (Lokal Bengkulu)	kg	10.000	
		- Manggis Manis (Premium)	kg	12.500	
		- Kembang Kol (Premium)	kg	11.500	
		- Termurah	kg	9.375	
		- Cap Bulog/ Dolog	kg	9.375	
2	GULA PASIR	- DN	kg	12.500	
3	MINYAK GORENG	- Bimoli Kemasan	1 liter	15,000	
		- Tanpa Merk	1 liter	12.150	
4	DAGING	- Sapi Lokal Paha Belakang	kg	120.000	
		- Sapi Lokal Paha Depan	kg	120.000	
		- Sandung Lamur	kg	80.000	
		- Tetelan	kg	60.000	
		- Has Luar	kg	120.000	
		- Has Dalam	kg	120.000	
		- Daging Ayam Broiler	kg	38.000	Naik
		- Daging Ayam Kampung	kg	65.000	
5	TELUR	- Telur Ayam Broiler	kg	22.400	Naik
		- Telur Ayam Kampung	kg	52.500	
6	Cabe Merah Keriting		kg	40.000	Naik
	Cabe Rawit Hijau		kg	28.000	
7	Bawang	- Merah	kg	35.000	
		- Putih	kg	26.000	Naik
8	Susu Kental Manis	- Bendera	370 gr	11.000	
		- Indomilk	370 gr	10.000	
9	Garam	Beryodium Halus	kg	13.000	
10	Kacang	- Kedelai Eks Impor	kg	8.600	
		- Tanah	kg	25.000	
		- Hijau	kg	23.000	
12	Mie Instan	- Kari Ayam	bks	3.000	
13	Ikan	- Asin Teri	kg	60.000	
		- Kembung	kg	35.000	
		- Segar Tongkol/ Tuna	kg	25.000	
14	Ketela Pohon		kg	4.000	
15	Jagung Pipilan Kering		kg	7.000	

PERKEMBANGAN HARGA BARANG STRATEGIS KOTA BENGKULU

	KOMODITI	HARGA (RP.)	KETERANGAN
1	Semen 3 Roda	57.000	
2	Semen Holcim	57.000	
3	Semen Merah Putih	55.000	
4	Semen Padang	58.000	
5	Besi Beton 6 mm	30.000	
6	Besi Beton 8 mm	45.000	
7	Besi Beton 10 mm	67.000	
8	Besi Beton 12 mm	97.000	
9	Triplek 6 mm	95.000	
10	Kayu Balok 7/14 Bawang	100.000	
11	Kayu Balok 3/25 Bawang	100.000	
12	Paku 2 cm (1 inch)	20.000	
13	Paku 3 cm (1 1/2 inch)	20.000	
14	Paku 4 cm (2 inch)	17.000	
15	Paku 5 cm (2 1/2 inch)	17.000	
16	Paku 7 cm (3 inch)	17.000	
17	Paku 10 cm (4 inch)	17.000	
18	Pupuk KCL	7.000	
19	Pupuk NPK (Mutiara)	10.000	
20	Pupuk SP36	2.000	
21	Pupuk Urea	7.000	
22	Pupuk ZA	1.400	
23	Gas LPG 3 KG	18.000	
24	Baja Ringan	91.000	

Sumber : Pantauan Pasar Minggu, Pasar Panorama dan Pasar Barukoto

bank bengkulu
tangguh dan tumbuh
Kantor Pusat :
Jl. Basuki Rahmat No.6 Telp. 21503, 21751, 22144 Bengkulu

TABUNGAN

NAMA BANK	JENIS	SALDO	BUNGA/TH	KRITERIA
Bank Bengkulu	Tabot		1,00%	
	Simpeda	Rp. 0 s.d Rp. 500 Rb	0,50%	
		> Rp. 500Rb s.d Rp. 5 Jt	1,00%	
		> Rp. 5 Jt s.d Rp. 50 Jt	1,25%	
		> Rp. 50 Jt s.d Rp. 500 Jt	1,50%	
		> Rp. 500 Jt	2,00%	
	Tabunganku	Rp. 0 s.d Rp. 500 Rb	0%	
		> Rp. 500Rb s.d Rp. 1 Jt	0,25%	
		> Rp. 1Jt	1,00%	

DEPOSITO

NAMA BANK	1 BLN	3 BLN	6 BLN	12 BLN
Bank Bengkulu	5%	5%	5,25%	5,25%

Iklan Mini BERDAYA MAKSI
Tarif MURAH dengan Jangkauan LEBIH LUAS
Tarif Iklan Rp 5.500 per baris. Minimal 3 baris, maksimal 10 baris.
KOTA BENGKULU : GRAHA PENA, Jl. P. Natadirja No. 69 Km 7 Telp (0736) 22060 & (0736)-20882
CURUP : DEPOT KORAN YANTO (samp wrg Kopi Ria), Jl. Merdeka No. 219 Telp (0732) 23516
MANNA : WAHAB ANANG AGENCY, Jl. Jend. Sudirman Simpang Tiga Rukis, Telp (0739) 21407

• SUMUR BOR •
HERMANSYAH SINAGA, Pembuatn & Servis Sumur Bor, Servis Jet Pum & Summersible Dpn Bencolen Mall (BIM) Hub. 081367722575/085783169529

• SUMUR BOR •
WFF BOR, Jaa Pembuatan Sumur Bor & Service, Hub. **Andi** Tlp/Wa 082346329870, A/L: Sukaraja Dusun II Bengkulu

• SUMUR BOR •
PM BOR, Menerima Pemb. Sumur Bor Dgn Mesin& Service, Hub. **Irwan** 085379259286, Almt Jl. S. Parman 6 RT.7 RW.2 Pdg Jati BKL

• JUAL TANAH •
LT 10x20, Lok. Prumnas Pinang Mas, SHM, Hrg Nego. Tanpa Perantara. Hub. 085228004888

Pembina Manajemen: DAHLAN ISKAN **Pemimpin Umum**: HM.MUSLIMIN (nonaktif), **General Manager/Penanggung Jawab**: MARSAL ABADI, **Wakil Pemimpin Umum/Manajer Personalia**: MUTIA AMPERIANA, **Pemimpin Perusahaan**: Hj. NURBAITI, **Wakil Pemimpin Perusahaan**: -, **Pemimpin Redaksi**: RIKY DWI PUTRA, **Redaktur Pelaksana**: PATRIS MUWARDI, **Redaktur**: SUMARLIN, HERI APRIZAL, FAZLUR RAHMAN, ADE HARYANTO **Wartawan Kota**: ANUGERAH WAHYU, IKSAN AGUS ABRAHAM, HASRUL, YUNIKE KAROLINA, WINDI JUNIUS, JIAFNI RISMAWARNI, ILHAM JULIANDI, **Wartawan di Daerah**: PERI HARYADI (Mukomuko), ARIE SAPUTRA WIJAYA (Kepahiang), M. RIZKI WAHYUDI (Seluma), ALBERTUS YUDI PRATAMA (Kaur), RIO AGUSTIAN (Bengkulu Selatan), TRI SHANDY RAMADANI (Bengkulu Utara), MUHARISTA DELDA (Lebong), WANDA FEBRIANDA (Rejang Lebong), JERI YASPRIANTO (Bengkulu Tengah), **Sekretaris Redaksi**: ANNA MARIYOHANA. **Pracetak**: SUTAMRIN (Kabag), FRAN SINATRA, ARI WIDARYANTO, HENDRA IRAWAN PUTRA, REFDIANTO, HEFFY JUNAIDI, **Teknologi Informasi (TI)**: ZULHAMDI, RUSDIYANTO **Manajer Iklan**: KOMI KENDY, **Account Executive (AE)**: WILMAN SITUMORANG, M. IRFANSYAH, DEVI ASTIKA, ADAM MALIK, RIKO PUTRA, AMALUDIN HAKIM, **Koordinator Penagihan Piutang Iklan dan Koran**: MARSAL ABADI, **Staf**: RIZKI NOVA AMELIA, FRANKY, HELEN, INDI SUDARTO, **Design iklan**: BOY RAHMAN HAKIM, VORWANTO, **Manajer Pemasaran**: HAZRIM, **Deputi**: MASRIYADI, **Staf Pemasaran**: SULISTI HARTINI, SIRHANUDIN, SAMRISMAN LUBIS, OZWARDI ARDIANSYAH, RUDI HARTONO, JULIMAN HAIDI. **Manajer Keuangan**: Hj. NURBAITI, **Deputi Manajer Keuangan**: AGUS SUWARSONO, **Accounting**: ELYA, SULUNG ERNAWATI, LUSIATI, **Event Organizer (EO)**: TUSDA ADHAM, BETTY HERLINA, **Divisi Anak Perusahaan**: SUKATNO, M FIRDAUS, JEFRI GINTING, M RASUL, SOPYAN ARDI, SUMANTRI, WARSIMAN, ERWIN ABENDI, HERU PP, MARSAL ABADI, DASPAN HARYADI, BAHMAN HADI, KARTUBI, M BASIR, WIRO IDRUS SALAM, NANANG SETIAWAN, DITA ASFANI, SUSANTO, PURNAMA SAKTI, SYAHBANDAR, AZMALIAR ZAROS, ARJUNA WIWAHA. **Penerbit**: PT BENGKULU SEMARAK PERMAI, **Komisaris Utama**: HM ALWI HAMMU, **Komisaris**: DWI NURMAWAN, LUKMAN SETIAWAN. **Direktur Utama**: H SUPARNO WONOKROMO. **Direktur**: HM. MUSLIMIN, MH, **Coorporate Lawyer Jawa Pos Group/Harian Rakyat Bengkulu**: Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, **Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan**: Graha Pena Rakyat Bengkulu Jalan P Natadirdja No. 69 KM 6,5 Bengkulu. **Telepon** (0736) 20882, 22060, 341694, 344754, 346771 **Faximile** (0736) 346770 **Perwakilan Jakarta**: Graha Pena Jakarta Lantai 6 JalanRaya Kebayoran Lama No. 16 Jakarta. (021)-53699581 **Fax** (021) 53651427 **Percetakan**: PT BENGKULU SINAR GRAFIKA, **Manajer Percetakan**: - , **Operasional Percetakan**: JOKO SANTOSO, MAWARDI, ARI YULIZAR, MESTA DOMIZA, HERMAN, TRIONO WIJAYA, MARSUDI, MEDI PURWANTO, APRIANDONI, HENDRI SAPUTRA, AGUNG SYAPUTRA, SAIWAN, **Alamat Percetakan**: Jalan WR Supratman RT 01 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Telepon 082180191842.**Tarif Iklan**: Display (umum) Rp.47.500/mmk, sosial/keluarga/pendidikan, film, dan ucapan selamat Rp 25.000/mmk, iklan baris/mini Rp 5.500/baris (min 3 baris, max 10 baris). Warna (minimal 1/4halaman) Rp 48.000/mmk satu warna, Rp 53.000/mmk (2 warna), dan Rp.62.500/mmk (full colour). Harga eceran Rp 6.000/eks, langganan Rp 165.000, luar kota tambah ongkos kirim.
- Wartawan Rakyat Bengkulu dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita - Wartawan Rakyat Bengkulu dalam menjalankan tugas dibekali kartu identitas. - Isi di luar tanggung jawab percetakan.

TELEPON PENTING

Polres	087877170691
Kantor PBK	085378635859
Rumah Sakit	0737 71148
PLN	0737 71154

POLING CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG

PILIHAN PEMBACA RB

Teguh — Nasirwan

Dalhadi Umar — Wawan Fernandez

Kopli — Rozi

Armansyah — Masropen

ARIS/RB

DIMINATI : Tampak fasilitas lapangan basket di Taman Presidium Lebong yang tak pernah sepi di akhir pekan.

Usul Rp 205 Juta Beli Alat Fitnes

PELABAI – Dalam perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Lebong mengusulkan dana Rp 205 juta. Usulan yang disampaikan melalui Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu ditujukan membeli peralatan fitnes outdoor.

Jumlah alat yang diusulkan 10 unit. Peralatan fitnes itu rencananya akan dipasng di taman Smart City Karang Nio serta kawasan Objek Wisata Air Putih. ''Besar harapan kami usulan bisa diakomodir," ujar Kepala Disparpora Kabupaten Lebong, Ir. Eddy Ramlan, M.Si.

Rencana pemasangan alat fitnes outdoor itu bertujuan untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menggalakkan pola hidup sehat di tengah pandemi Covid-19. Dimana salah satu poinnya mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak serta keterampilan berfikir kritis. "Tidak bisa dipungkiri rohani yang sehat pasti ditunjang jasmani yang bugar," ungkap Eddy.

Diketahui, Disparpora sejauh ini telah memasang alat fitness luar ruangan di beberapa kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Antara lain di Taman Tugu Presidium dan Taman Smart City Karang Nio. Sejak dipasang peralatan fitnes, banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas gratis itu untuk menjaga kebugaran jasmani. "Mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, makanya kami berniat menambah fasilitas kebugaran di beberapa fasilitas publik terbuka," tukas Eddy.(**sca**)

Pergantian Ibukota Lebong Rawan Molor

PELABAI – Rencana perubahan nama ibukota Kabupaten Lebong dari Kecamatan Pelabai menjadi Kecamatan Tubei tahun ini, rawan tak terkejar. Hingga saat ini DPRD Kabupaten Lebong belum mengesahkan regulasinya, yakni menerbitkan Peraturan Daerah (Perda). Bahkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan nama kecamatan itu baru sebatas pandangan fraksi.

Dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Kabupaten Lebong, Indra Gunawan, M.Si mengaku pembahasan Raperda perubahan nama Kecamatan Pelabai menjadi Kecamatan Tubei itu akan dituntaskan tahun ini. Tidak dipungkirinya pembahasan terkendala lantaran status pandemi Covid-19 yang sejak Maret menjadi ancaman serius di tanah air. "Nanti akan disepakati lagi dengan unsur pimpinan kapan jadwal pembahasannya dilanjutkan," kata Indra.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaen Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengatakan, pergantian nama Pelabai menjadi Tubei memang harus dilakukan sebagai tertib administrasi. Soalnya Sampai saat ini belum ada titik koordinat ibukota Kabupaten Lebong. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu tertera nama ibukota Kabupaten Lebong adalah Tubei.

"Jadi untuk tertib administrasi, harus ada fisik Tubei itu," ujar Mustarani.

Baik Pemerintah Kecamatan Pelabai maupun 7 pemerintah desa dan 1 pemerintah kelurahan yang masuk administrasi Kecamatan Pelabai sepakat nama kecamatan itu berganti menjadi Kecamatan Tubei. Termasuk Presidium Kabupaten Lebong sangat setuju jika Pemkab Lebong segera membentuk Kecamatan Tubei sebagai bentuk menindaklanjuti perjuangan pemekaran Kabupaten Lebong.

"Kami harap Raperda yang sudah disampaikan ke DPRD dapat segera dituntaskan menjadi Perda," tutur Mustarani.

Dilansir sebelumnya, 7 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kecamatan Pelabai juga diberikan kesempatan mengusulkan perubahan nama wilayahnya sesuai dengan nama asli sebelum pemekaran. Soalnya saat bersamaan Pemkab Lebong juga akan mengusulkan Raperda tentang Revisi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Termasuk Kelurahan Tanjung Agung berkesempatan berganti nama menjadi Kelurahan Tubei yang namanya persis dengan nama calon kecamatan yang akan dibentuk. (**sca**)

Sekda : Waspada Hoax Covid-19

PELABAI - Selain diimbau tetap waspada dan mengikuti anjuran pemerintah terkait antisipasi penyebaran covid-19 atau virus corona, masyarakat juga diimbau tidak terlalu panik dalam menyikapinya. Salah satunya bijak menggunakan media sosial (medsos), khususnya ketika mengunggah informasi seputar Covid-19.

"Kalau informasi yang diterima belum valid, jangan sembarang dibagikan karena kalau ternyata informasi yang dibagikan itu hoax, bisa-bisa terjerat pidana," tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si.

Justru di saat pemerintah tengah serius menangani sekaligus memerangi Covid-19, masyarakat diharap memberi dukungan. Salah satunya tidak mengunggah informasi yang justru membuat masyarakat semakin resah. Akan sangat membantu jika masyarakat mengunggah hal positif lainnya di medsos. "Misalnya dengan membagikan trik mencegah Covid-19 yang memang dirilis pihak medis," ungkap Sekda.

Setiap pengguna medsos berkewajiban mengedukasi masyarakat dengan benar. Covid-19 bukan untuk ditakuti. Namun harus diperangi secara bersama-sama sehingga butuh dukungan semua elemen masyarakat. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), masyarakat dilarang membuat atau menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang berujung kebencian.

"Pastikan setiap informasi yang diterima berasal dari narasumber atau media yang jelas," tutur Sekda.

Senada, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lebong, H. Herwan Antoni, SKM, M.Si mengajak seluruh pegiat medsos tidak menakut-nakuti masyarakat di tengah kekhawatiran masyarakat akan penyebaran Covid-19. Termasuk kalangan media, diharapnya ikut membantu pemerintah dalam memerangi Covid-19 dengan menginformasikan perkembangan penganan-an Covid-19 dengan data yang benar-benar valid.

"Kalau media yang jelas saya yakin kecil kemungkinan menyampaikan informasi hoax. Namun hoax lebih rawan terjadi di kalangan pegiat medsos," tukas Herwan.

Sementara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lebong, Aris Delda, S.IP mengingatkan kalangan wartawan benar-benar menggali informasi dari narasumber yang berkompeten. Khususnya perkembangan Covid-19. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, khususnya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 juga diharap tidak menutup-nutupi informasi seputar kasus Covid-19 maupun penanganan yang telah dilakukan. "Insya Allah wartawan yang profesional tahu mana yang harus dipublis dan mana yang tidak ketika mendapatkan sebuah informasi," tandas Aris.(**sca**)

Tuntaskan Rekam Data 8 Kecamatan

PELABAI - Mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lebong akan memaksimalkan pembaruan administrasi kependudukan. Sejauh ini, Dukcapil tengah memaksimalkan perekaman data penduduk di 4 kecamatan. Yakni Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Amen dan Kecamatan Bingin Kuning.

Termasuk Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Pinang Belapis dan Kecamatan Lebong Utara. Sedangkan perekaman data di 4 kecamatan lain telah dituntaskan Oktober. Yakni Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Pelabai.

"Mudah-mudahan hingga Desember, persisnya sebelum hari pemungutan suara Pilkada 9 Desember perekaman data selesai saratus persen," ujar Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lebong, Elva Mardiana, S.IP, M.Si.

Teknisnya, Dukcapil melakukan perekaman data e-KTP dengan mendatangi langsung masyarakat di kediamannya atau jemput bola. Teknisnya, perekaman data e-KTP itu dipusatkan di masing-masing kantor camat. Jadwalnya sudah ditetapkan. Tak hanya sebatas melakukan perekaman, dalam program ini petugas juga akan langsung melakukan cetak e-KTP.

"Setelah dicetak akan langsung diserahkan kepada masyarakat. Namun revisi data kependudukan ini kami prioritaskan untuk menjamin hak pilih masyarakat yang belum terdata di DPT (daftar pemilih tetap, red) Pilkada serentak 9 Desember, namun memenuhi syarat sebagai pemilih," tukas Elva.

Khususnya data pemilih pemula, baik masyarakat yang memasuki usia 17 tahun atau masyarakat yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah. Dimana jumlah wajib e-KTP sifatnya dinamis. Dalam artian akan terus berubah seiring waktu. Justru itu ia berharap masyarakat proaktif melaporkan ke Dukcapil atau perangkat desa dan kelurahan ketika terjadi perubahan data di Kartu Keluarganya.

"Baik adanya penambahan penduduk akibat kelahiran atau perpindahan maupun pengurangan penduduk karena kematian atau perpindahan. Setiap orang yang telah berusia 17 tahun, wajib memiliki e-KTP," jelas Elva. (**sca**)

1.554 KPPS Dilantik Minggu Depan

PELABAI - Jika tidak ada kendala, 1.553 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilantik 23 November. Masa tugasnya sebulan.

"'Sebelum ditugaskan ke 222 TPS (tempat pemungutan suara, red), seluruh KPPS yang lulus seleksi itu akan kami berikan bimbingan teknis," kata Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumer Daya Manusia (SDM) KPU Lebong, Effan Lavendes, A.Md.

Untuk teknis pelantikannya, Effan pastikan akan dibahas lebih lanjut. Opsinya bisa dilaksanakan serentak di masing-masing desa dan kelurahan. Namun bisa juga melalui zoom meeting. ''Yang jelas seperti apapun bentuknya, teknisnya tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah klaster baru penyebaran Covid-19," terang Effan.

Lebih jauh Effan mengatakan, jumlah peserta yang mengikuti seleksi KPPS mencapai 1.910 orang. Jumlah itu terbagi merata di semua desa dan kelurahan dengan jumlah sesuai syarat minimal 7 orang per TPS. Penentuan hasil seleksi tetap dirangking dengan tujuan peserta seleksi di bawah rangking 7 ditetapkan sebagai cadangan. "Ketika ada KPPS yang harus diganti, peserta cadangan itulah yang akan menggantikan," ungkap Effan.

Di sisi lain, Effan berharap masyarakat tidak ragu mendatangi TPS. Soalnya setiap KPPS diwajibkan memakai masker ketika bertugas di TPS. Termasuk disediakannya tempat cuci tangan serta bilik khusus bagi pemilih yang datang ke TPS dengan kondisi suhu badan di atas normal. ''Makanya masyarakat juga harus memakai masker dan kami juga akan menyediakan masker di TPS untuk pemilih yang tidak membawa masker," tutup Effan. (**sca**)

TELEPON PENTING

Kapolres	: 082280559797, 081336009977
Wakapolres	: 081367395996
Kabag Ops	: 081368293186
Kasat Reskrim	: 081274890817
Kasat Intel	: 08127317715
Kasatres Narkoba	: 085369000969
Kasat Binmas	: 081271279066
Kasat Lantas	: 081396058666
Pabung	: 081349049001
PBK	: 081273229643, 085268355005

Tiga Perwira Bergeser

MUKOMUKO – Mutasi sejumlah perwira, turut merotasi dan menggeser tiga perwira di Polres Mukomuko. Ketiganya mendapat pemberhentian dari jabatan lama dan diangkat di jabatan baru sesuai dengan Telegram Kapolda Bengkulu Nomor ST/502/XI/KEP./2020 tertanggal 14 November 2020, sebagai tindaklanjut dari Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor KEP/225/XI/2020.

Kapolres Mukomuko AKBP. Andy Arisandi, SH, S.IK, MH melalui Wakapolres, Kompol Edy Susanto, S.Sos mengungkapkan tiga perwira yang bergeser yakni AKP. Deni Kusnadi, SH, AKP. Dian Setiawan, SH dan AKP. Muslim. "Telegramnya baru kita terima, ada tiga perwira di Polres Mukomuko yang masuk dalam Surat Telegram itu," kata Wakapolres.

AKP. Dedi Kusnadi, SH selama ini sebagai Pejabat Sementara (PS) Kabag Sumda Polres Mukomuko. Ia kemudian diangkat dalam jabatan baru sebagai PS Kabag Ops Polres Kepahiang. Sedangkan jabatan yang ditinggalnya diisi AKP. Dian Setiawan, SH.

AKP. Dian sebelumnya sebagai PS Kabag Ren Polres Mukomuko. Menggantikan posisi AKP Dedi, perwira ini juga masih dalam posisi sebagai PS Kabag Sumda.

Lalu jabatan Kabag Ren Polres Mukomuko, diisi AKP Muslim juga sebagai PS. AKP Muslim sebelumnya di Polres Mukomuko menjabat di jabatan Kasubbag Binops Bagops. Dengan begitu, kini jabatan yang ditinggal Muslim dalam posisi kosong.

Masih disampaikan Wakapolres, selain adanya perwira yang dimutasi di dari jabatan yang ada, Polres Mukomuko juga menerima tiga orang perwira baru. Mereka ini mendapat penempatan di Polres Mukomuko usai lulus dari Pendidikan Alih Golongan (PAG) dari Bintara menjadi Perwira. "Sesuai dengan Surat Telegram Nomor ST/503/XI/KEP./2020, juga tertanggal 14 November 2020," kata Wakapolres.

Ketiga perwira baru yang ditempatkan di Polres Mukomuko terdiri, Ipda. Kurtani, Ipda. Supriadi dan Ipda. Warno. "Ketiga perwira ini lulusan PAG tahun 2020," terang Wakapolres.

Untuk kegiatan serah terima jabatan (Sertijab) dan penerimaan perwira baru, Wakapolres belum dapat memastikan. Tidak menutup kemungkinan baru akan digelar minggu depan. Pasalnya, kini Polres Mukomuko tengah disibukkan dengan sejumlah kegiatan. "Kegiatan kita lagi padat. Jadi kemungkinan belum dalam minggu ini. Tapi kita akan berkoordinasi, baik dengan pimpinan maupun dengan Polres terkait lainnya," jelas Edy.**(hue)**

LAKA MAUT: Tabrakan truk dengan sepeda motor mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Tampak motor korban hancur akibat tabrakan tersebut.

Hanya Dikucur DAK Nonfisik Rp 390 Juta

MUKOMUKO – Kegiatan Bidang Pasar, Industri Kecil dan Menengah, tahun depan nihil dukungan dana alokasi khusus (DAK) fisik. Hanya saja, pemerintah pusat masih memberi perhatian dengan memberikan alokasi DAK nonfisik untuk kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil menengah (UKM).

Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Mukomuko, Nurdiana, SE, M.AP mengakui DAK untuk pasar tidak ada sama sekali. "Tapi kita masih menunggu, berharap masih bisa muncul," ujarnya.

Dinas ini untuk tahun depan, sementara ini hanya mendapatkan DAK nonfisik dengan anggaran sekitar Rp 390 juta. Menurut Nurdiana, dana tersebut untuk pelaksanaan sejumlah kegiatan pelatihan. Khusus dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan UKM.

"Dana itu untuk pelatihan koperasi. Karena sumber alokasinya dari Kementerian Koperasi dan UKM," kata Nurdiana yang juga menjabat Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Mukomuko.

Sementara pengajuan dari dinas untuk sejumlah kegiatan fisik dan pengadaan bantuan, belum ada yang terakomodir oleh pemerintah pusat. "Kita sudah berusaha untuk pengajuan bantuan sejumlah peralatan. Sudah kita input di sistem aplikasi. Tapi tidak muncul untuk Mukomuko. Kita tidak tahu apa sebabnya," kata Nurdiana.

Sebelumnya, Disperindagkop) dan UKM Mukomuko mengajukan dana hingga Rp 375 juta ke Kementerian Koperasi dan UKM. Dana itu untuk mendukung Program Penciptaan Iklim UKM (IUKM) yang kondusif di Kabupaten Mukomuko. Dengan target kegiatan untuk 100 UKM. "Pendanaan yang diajukan Rp 200 juta untuk percepatan IUMK melalui koordinasi dan pendampingan IUMK. Lalu Rp 75 juta berupa sosialisasi IUMK dengan pemangku kepentingan dan pelaku usaha. Serta Rp 100 juta untuk monitoring dan evaluasi IUMK," terangnya.

Selain untuk UKM, Disperindagkop) dan UKM juga mengajukan 1.800 unit peralatan. Khusus untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) yang bergerak di bidang usaha kuliner.**(hue)**

PERI/RB

TERBAKAR: Rumah milik Sihi (75) warga Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit dilalap si jago merah, Minggu (15/11).

Rumah Terbakar, Kerugian Rp 150 Juta

AIR DIKIT – Sihi (75), warga Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit harus mengalami kerugian hingga Rp 150 juta. Hal itu setelah rumahnya dilalap si jago merah, kemarin (15/11). Kejadian itu baru diketahui korban sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu, ia diberitahu oleh tetangganya karena ketika kejadian korban tengah bekerja di kebun.

Kapolres Mukomuko AKBP. Andy Arisandi, SH, S.IK, MH melalui Kapolsek Mukomuko Utara, Iptu. Prayitno, SH menerangkan, warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sekitar 30 menit kemudian, satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi membantu memadamkan api.

"Saat kejadian pemilik rumah sedang bekerja di kebun. Setelah diberitahu, pemilik bersama warga berusaha memadamkan api. Sekitar pukul 09.30 WIB, mobil pemadam kebakaran tiba dan berhasil memadamkan api," terang Prayitno.

Diduga kuat kejadian itu disebabkan adanya hubungan arus pendek listrik atau korsleting. Dugaan ini diperkuat oleh salah satu warga yang juga tetangga korban, Alpian. Ia yang pertama kali masuk ke dalam rumah saat mengetahui rumah tersebut mengepul asap tebal. Alpian berhasil menyelamatkan satu unit motor milik korban. Sedangkan harta benda dan surat berharga korban tidak satupun yang dapat diselamatkan.

"Berdasarkan keterangan Alpian, diduga api berasal dari korsleting listrik yang berawal dari colokan kulkas. Saksi sempat melihat, saat masuk ke rumah berupaya menyelamatkan harta benda korban," kata Prayitno.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara itu, meskipun kediaman korban tidak sampai rata dengan tanah akibat kejadian itu, namun untuk bisa dihuni kembali, rumah tersebut harus mendapatkan perbaikan. "Secara fisik, rumah korban dapat kita lihat masih berdiri. Tapi untuk dihuni, sudah tidak layak. Harus diperbaiki dulu," jelas Prayitno.**(hue)**

Pelajar SMP Tewas

TERAMANG JAYA – Seorang pelajar SMP tewas setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil truk. Korban bernama Rafael Putra Mirzanda (15), warga Desa Pernyah, Kecamatan Teramang Jaya. Rafael diketahui meninggal di lokasi kejadian sebelum sempat dilarikan ke puskesmas.

Kecelakaan lalu lintas berujung maut itu terjadi sekitar pukul 21.00 WIB, Sabtu (14/11) malam di ruas jalan lintas Desa Brangan Mulya, Kecamatan Teramang Jaya.

Kapolres Mukomuko AKBP. Andy Arisandi, SH, S.IK, MH melalui Kasat Lantas, Iptu. Dendi Putra, SH, MH mengatakan malam itu, korban mengendarai motor Honda Revo warna hitam seorang diri. "Menurut keterangan sejumlah saksi, motor yang dikendarai korban tanpa lampu," kata Dendi.

Korban saat itu melaju dengan kecepatan tinggi. Saat di jalan menurun, dari arah berlawanan melaju truk Mitsubishi Canter warna kuning bernomor polisi BD 8934 DG. Truk dikemudikan Yulizar (46), warga Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara (BU). Ia ditemani seorang kernek, Eko Purwanto (39), warga Desa Tambak rejo, Kecamatan Padang Jaya, BU.

"Dari keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian, sesuai laporan dari Kapolsek Teramang Jaya, bahwa truk melaju dari arah Padang menuju BU dengan kecepatan sedang. Dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Revo dengan kecepatan tinggi dan tanpa lampu lalu terjadi tabrakan," terang Dendi.

Tabrakan keras itu cukup mengejutkan warga sekitar. Motor yang dikendarai korban hancur seluruh bodinya akibat tabrakan tersebut. Korban tergeletak di badan jalan. Sedangkan truk, karena berupaya menghindar akhirnya masuk ke jurang. Namun sopir dan kernek truk tidak sampai mengalami luka berat. "Motor korban hancur," ujar Dendi.

Kini kedua kendaraan yang terlibat laka maut itu sudah diamankan di Mapolsek Teramang Jaya. "Korban yang meninggal dunia sudah diserahkan ke p ihak keluarga. Dan hari ini (kemarin) korban sudah dikebumikan," tutup Dendi.**(hue)**

Mekanisme Debat Tak Ada Perubahan

Debat Kedua 25 November

MUKOMUKO – KPU Mukomuko menjadwalkan kegiatan debat kedua bagi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko tahun 2020. Direncanakan 25 November mendatang dengan tempat pelaksanaan kemungkinan masih menggunakan tempat yang sama. Yakni Aula Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Pemkab Mukomuko.

"Debat publik Cabup dan Cawabup Mukomuko putaran kedua ini akan diselenggarakan pada tanggal 25 November 2020," kata Ketua KPU Mukomuko, Irsyad.

Irsyad mengatakan mekanisme debat publik putaran kedua mendatang tidak banyak perubahan. Mekanisme yang dipakai sama seperti debat putaran pertama.

"Mekanisme debat tetap enam segmen model debat sebelumnya, sesuai ketentuan yang sudah diatur KPU RI," kata Irsyad.

Mengenai porsi bicara cawabup, dikatakan Irsyad, tidak tergantung dengan mekanisme debat. Akan tetapi kembali kepada cawabupnya sendiri, apakah mau memanfaatkan momen debat atau tidak. "Dari awal memang cawabup sudah diberi kesempatan bicara. Hanya saja tidak maksimal dimanfaatkan," kata Irsyad.

Ia tidak menampik, sebelumnya sempat rencana pihaknya mengubah mekanisme debat

IRSYAD

Cabup dan Cawabup Mukomuko putaran kedua. Dijadikan seperti mekanisme debat yang dibuat pada debat pertama Cagub-Cawagub Provinsi Bengkulu.

Dengan memberi kesempatan bicara Cabup dan Cawabup, dibuat terpisah. Dengan begitu, mau tidak mau, dengan mekanisme tersebut, Cabup maupun Cawabup wajib menyampaikan argumentasinya dalam debat. Rencana tersebut sekaligus menjawab rasa penasaran publik Mukomuko terhadap cawabup yang akan dipilih.

Namun kemudian, wacana itu kembali dievaluasi. Sehingga diputuskan kembali dilaksanakan sama seperti debat kandidat di putaran pertama. "Memang dilihat, pada debat putaran pertama, dua orang Cawabup Mukomuko sangat "irit" bicara. Setelah kita bahas lagi Kamis lalu, mekanisme debat tetap dilaksanakan kembali seperti pada putaran pertama, tidak berbeda jauh," tutup Irsyad.**(hue)**

Jamin Dana Tetap di Kasda

MUKOMUKO – Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko, Ahmad Luthfi, SE menjamin setiap dana yang sudah masuk ke Kas Daerah (Kasda) Pemkab Mukomuko sesuai dengan item kegiatan akan tetap di Kasda. Pembayaran untuk setiap proyek disesuaikan dengan ketentuan di kontrak pekerjaan dan aturan yang sudah dibuat pemerintah. Jika proyek itu ketentuannya harus dibayarkan bertahap, maka harus secara bertahap.

"Tetap pada aturan main. Jika uang muka hanya 30 persen, maka dibayarkan segitu. Sisa uang yang sudah disalurkan 100 persen oleh pusat, uangnya tetap di Kasda," kata Ahmad.

Dijelasnya, sudah ada komitmen pihaknya dengan seluruh OPD yang punya kegiatan. Terutama kegiatan yang didanai dari dana alokasi khusus (DAK) fisik. Ketika dana sudah masuk dari pusat, dana itu tidak boleh lama di Kasda. Harus segera diproses oleh OPD terkait untuk kemudian disalurkan ke pihak penerima atau pihak rekanan.

"Aturan kita, sudah disekapati dengan pengelola. Yakni, salur dana, dana salur. Maksudnya, ketika dari pusat masuk ke Kasda, kita konfirmasikan ke OPD pengelola. Agar segera meminta pembayaran sesuai porsi dan kontrak mereka," jelas Ahmad.

Mengenai dana yang disalurkan sekaligus dari pusat, Ahmad menyebut, hal itu merupakan kebijakan relaksasi dari pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2020. Namun demikian, penyaluran ke pihak ketiga harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Mengenai 100 persen ke Kasda, karena ada PMK yang mengatur mengenai relaksasi. Namun dari OPD kepada pihak ketiga, itu tetap sesuai ketentuan," terang Ahmad.**(hue)**

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Terminal Simpang Nangka Air Meles Atas
CURUP - 39153

Rekap Daftar Harga Bahan Pokok Di Tingkat Pengecer Pasar Atas Curup

1. Bayam	2.500	10. Terong Ungu	3.000	19. Daging Sapi	120.000
2. Bawang Daun	6.000	11. Sawi Manis	3.000	20. Daging Kerbau	120.000
3. Cabe Rawit Hijau	32.000	12. Kol	5.000	21. Ikan Nila	26.000
4. Cabe Merah Besar	35.000	13. Bawang Merah	36.000	22. Ikan Mas	30.000
5. Cabe Keriting	40.000	14. Bawang Putih	23.000	23. Ikan Laut Sarden	26.000
6. Buncis	8.000	15. Kangkung	2.000	24. Ikan Lele	24.000
7. Tomat	5.000	16. Kentang	12.000	25. Telur Ayam Ras	22.000
8. Kacang Panjang	5.000	17. Timun	4.000	26. Daging Ayam Ras	32.000
9. Wortel	5.000	18. Kol Kembang	10.000	27. Beras Premium	10.250

Positif Corona Meninggal Lagi

Konfirmasi Positif Bertambah 8 Kasus

CURUP – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Rejang Lebong (RL) merelease satu kasus positif meninggal dunia. Yaitu kasus 248 seorang laki-laki berusia 60 tahun warga asal Kecamatan Curup. Kasus 248 ini awalnya memiliki gejala atau keluhan sesak dan demam, serta sempat dirawat di RSUD Curup hingga akhirnya meninggal dunia.

''Benar, hari ini ada satu kasus konfirmasi positif yang meninggal dunia dan sudah dimakamkan sesuai SOP Covid-19 di pemakaman khusus Kecamatan Curup Selatan. Sebelumnya kasus ini sempat menjalani perawatan di RSUD Curup," terang juru bicara Gugus Tugas sekaligus Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten RL Syamsir, S.KM, M.KM kemarin.

Dilanjutkan Syamsir, selain satu kasus meninggal dunia, juga ada penambahan 8 kasus baru konfirmasi positif. Rinciannya kasus 250 perempuan (32) asal Kecamatan Curup Tengah punya riwayat kontak dengan kasus 204 dan kasus 251 laki-laki (36) asal Kecamatan Curup Tengah ada riwayat kontak kasus 194.

Kemudian, lanjut Syamsir, kasus 252 laki-laki (37) asal Kecamatan Curup Tengah yang memiliki kontak dengan kasus 194. Kasus 253 perempuan (34) asal Kecamatan Curup Utara ada riwayat kontak kasus 238 dan kasus 254 perempuan (27) asal Kecamatan Curup Tengah yang memiliki riwayat kontak dengan kasus 206.

Serta, tambah Syamsir, kasus 255 perempuan (60) asal Kecamatan Curup yang memiliki riwayat kontak dengan kasus 229. Kasus 256 laki-laki (31) asal Kecamatan Curup dan kasus 257 laki-laki (53) asal Kecamatan Curup. ''Dengan adanya tambahan 8 kasus baru ini maka total kesuluruhan konfirmasi positif menjadi 257 kasus. Sedangkan konfirmasi selesai atau sembuh 189 kasus dan sisanya 68 kasus masih dalam pengawasan," demikian Syamsir. **(dtk)**

WANDA/RB

HIBURAN: Salah satu objek wisata di Rejang Lebong selalu ramai saat akhir pekan, kemarin.

Pengelola Wisata Diingatkan Disiplin Prokes

CURUP – Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong (RL) mengingatkan seluruh pengelola lokasi objek wisata dan destinasi wisata yang ada di Kabupaten RL. Hal ini terkait dengan protokol kesehatan (prokes) Pandemi Covid-19. Baik itu soal penyediaan tempat cucitangan pakai sabun maupun soal pengunjung yang wajib pakai masker.

Ini disampaikan Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten RL Ahmad Chalid, ST kepada RB kemarin. ''Para pengelola wisata kita ingatkan kembali untuk selalu memperhatikan kedisiplinan prokes, baik dari mereka sendiri dalam pengelolaan. Maupun terhadap para pengunjung, khususnya dalam penggunaan masker saat melakukan kunjungan wisata," tegas Achmad.

Diungkapkan Achmad, sejak diberlakukannya new normal atau kebiasaan adaptasi kehidupan baru, jumlah kunjungan wisata perlahan-lahan terus mengalami peningkatan. Sehingga mereka juga terus mengingatkan pengelola untuk selalu disiplin prokes. Apalagi pengunjung yang datang, bukan hanya warga lokal, banyak juga dari luar kabupaten bahkan dari luar provinsi.

''Makanya kedisplinan prokes harus benar-benar dilaksanakan untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Terlebih para pengunjung yang datang dari luar kabupaten dalam provinsi maupun untuk pengunjung dari luar provinsi juga cukup banyak. Dan kita akan melakukan pengecekan terhadap tempat-tempat wisata untuk memastikan kedisplinan prokes tersebut," demikian Achmad. **(dtk)**

Perusahaan Siap Akomodir Aspirasi Masyarakat

PUT – Pihak PT. CRF yang bergerak di bidang AMPD serta stone crosher yang beroperasi di Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding berjanji akan memenuhi permintaan dan aspirasi yang sudah disampaikan masyarakat saat menggelar aksi di Kantor Camat PUT Sabtu (14/11) lalu. Hal ini juga sudah disepekati antara perusahaan dan masyarakat dengan disaksikan, pihak kormail, polsek dan Kecamatan PUT.

Hal ini juga ditegaskan pihak perwakilan perusahaan PT CRF Andre kemarin kepada RB. ''Kita sudah buat kesepakatan bersama warga dan disaksikan pak camat, dari koramil serta Kapolsek PUT. Namun itu semua tidak bisa langsung sekaligus selesai dalam waktu singkat, makanya kami minta tenggang waktu sesuai kesepakatan yang sudah ditandatangani di atas materai," terang Andre kemarin.

Diantaranya, sambung Andre, soal keluhan masyarakat terhadap debu dan asap, soal drainase maupun upaya untuk mengurangi bau tidak sedap dari kegiatan perusahaan. Begitu juga soal penyerapan tenaga kerja lokal warga setempat, tetap diupayakan segera dilakukan. Serta beberapa kesepakatan lainnya seuai aspirasi masyarakat Desa Tanjung Sanai II.

''Kita juga akan mengupayakan penyaluran CSR secara berkala terprogram dalam bentuk berbagai kegiatan sosial. Apakah itu pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako maupun kegiatan sosial lainnya seperti sunatan massal bagi masyarakat di lingkungan Desa Tanjung Sanai II. Bisa per triwulan, per semester atau setiap tahun," imbuh Andre.

Terpisah, Camat PUT Harlan Tony, SH yang dikonfimasi terpisah sebelumnya juga membenarkan bahwa pihak perusahaan akan berupaya mengakomodir tuntutan masyarakat Desa Tanjung Sanai II. Meskipun ada beberapa point yang sebenarnya bukan ranahnya perusahaa untuk mengakomodir. ''Semuanya sudah ada kesepakatan dan perusahaan memiliki waktu satu bulan untuk merealisasikan. Kecuali soal iuran BPJS, itukan bukan ranahnya perusahaan," singkat Harlan. **(dtk)**

Tabrak Dump Truck, Pemuda Tewas

CURUP – Kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa kembali terjadi di Kabupaten Rejang Lebong (RL). Kejadian kecelakaan maut ini terjadi di kawasan Jalan Pembangunan Desa Teladan Kecamatan Curup sekitar pukul 23.45 WIB Sabtu (14/11) malam lalu. Korban yang meninggal dunia adalah pengendara motor seorang pemuda bernama Torik (19) warga Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup.

Sedangkan rekannya Parkasi Adha (19) warga Desa Pagar Gunung Kecamatan Bermani Ulu mengalami luka-luka memar di wajah dan memar di bagian dada. Sedangkan untuk dump truck yang ditabrak korban belum diketahui identitasnya karena diduga pasca kejadian melarikan diri dari lokasi kejadian.

Dijelaskan Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH melalui Kasat Lantas Iptu Aan Setiawan, S.Sos, MM kepada RB, dari keterangan saksi kejadian berawal saat korban dan rekan yang diboncengan melajukan motor F1ZR warna hitam Nopol BD 3487 KN dari arah perumahan PU menuju Kelurahan Pasar Hewan. Sampai di Jalan Pembangunan Desa Teladan, diduga korban tidak melihat keberadaan mobil dumptruck yang berhenti di sebelah kiri jalan motor melaju.

EVAKUASI : Salah satu korban kecelakaan saat akan dievakuasi ke RSUD Curup Sabtu 914/11) malam lalu.

Akibatnya, sambung Aan, korban tidak mampu mengendalikan kendaraannya dan menabrak bagian bak belakang Dumtruck. Diduga saat ini sopir dumptruck ada didalam mobil dan sempat keluar. Namun karena melihat adanya motor yang menabrak bagian belakang mobilnya, sang pengendara langsung menghidupkan mobil dan langsung tancap gas meninggalkan lokasi kejadian.

''Dari keterangan saksi, korban dan rekannya sempat terjepit oleh motor dan bak belakang mobil. Sopir mobil awalnya memajukan mobil sedikit ke arah depan. Namun selanjutnya sopir dumptruck diduga langsung tancap gas dan melarikan diri. Untuk korban sudah dibawa ke rumah duka dan dimakamkan hari ini. Motor korban sudah kita amankan ke Polres dan dumptruck serta pemiliknya masih dalam penyelidikan," demikian Aan. **(dtk)**

Pelayanan Kejari RL Kembali Normal

Mulai Dibuka Hari Ini

CURUP – Kejaksaan Negeri (kejari) Kabupaten Rejang Lebong (RL) memastikan mulai hari ini (16/11) pelayanan di instansi mereka akan dibukan kembali normal. Dimana sebelumnya mereka melakukan pemberhentian pelayanan sementara karena ada salah satu staf mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19.

''In Sya Allah hari ini pelayanan di kantor kita sudah normal kembali seperti biasanya. Karena sebelumnya kita stop sementara karena ada yang terkonfirmasi positif. Untuk staf kita tersebut saat ini masih menjalani isolasi mandiri," sampai Plt. Kepala Kejari (Kajari) RL Henri Hanafia kemarin kepada RB.

Dijelaskan Henri, kebijakan pembukaan pelayanan kembali tersebut setelah adanya hasil swab dan rapid test seluruh jajaran mereka sudah ada hasilnya. Masing-masing Swab Test sebanyak 15 orang yang tercatat Sempat kontak erat dan hasilnya semua negatif. Kemudian untuk 21 pegawai lainnya yang tidak kontak erat, dilakukan Rapid Test dan hasilnya semua Unreaktif.

''Makanya hari ini kita akan kembali beroperasi secara normal sebagaimana mestinya. Dan tetap akan menjalankan operasional dengan Prokes (protokol kesehatan, red) secara ketat. Agar jangan sampai ada lagi jajaran kita yang terpapar Covid-19 nantinya," demikian Henri. **(dtk)**

Calon Pengantin Wajib Sumbang Bibit Aren

Upaya Pelestarian Tanaman Aren

SINDANG KELINGI – Pemerintah Desa Sindang Jaya Kecamatan Sindang Kelingi memasukan aturan menarik ke dalam peraturan desa mereka terkait pelestarian pohon aren. Dimana pasangan calon pengantin diwajibkan menyumbang bibit aren untuk ditanam di lahan milik desa atau di sekitar lahan sumber air.

Dijelaskan Kepala Desa Desa Sindang Jaya Andri Jendro Sujarno kepada RB, kewajiban tersebut tertera dalam Perdes Sindang Jaya Nomor 13 tahun 2019. ''Pasangan calon pengantin diwajibkan menyumbang minimal 10 bibit aren kepada desa. Bibit tersebut selanjutnya ditanam bersama-sama di lahan-lahan yang sudah dipetakan desa," terang Andri.

Dilanjutkan Andri, upaya tersebut dalam rangka pelestarian dan perlindungan tanaman aren yang juga mnjadi salah satu sumber kehidupan warga mereka. Sampai saat ini setidaknya sudah lebih dari seratus bibit aren dari pasangan calon pengantin yang ditanam di wilayah desa mereka.

''Jadi bukan hanya sebagai upaya perlindungan dan pelestarian tanaman aren, tapi jika sudah menghasilkan tetap bisa menjadi sumber penghidupan masyarakat dan anak cucunya nanti. Apalagi sama-sama kita ketahui di Kabupaten Rejang Lebong, produksi gula aren menjadi salah satu sektor unggulan asli Rejang Lebong," demikian Andri. **(dtk)**

ARIE/RB

TERBENGKALAI: Sekretariat PWI Kepahiang yang dipinjamkan Pemkab Kepahiang sudah beberapa tahun ini terbengkalai dan tidak dihuni.

Lima Pama Dimutasi

KEPAHIANG - Sebanyak 5 jabatan Perwira Pertama (Pama) jajaran Polres Kepahiang, dalam waktu dekat ini resmi berganti. Ini setelah Kapolda Bengkulu mengeluarkan Surat Telegram dengan nomor ST/502/XI/KEP./2020 pada 14 November 2020.

Kelima Pama tersebut yakni AKP Umar Fatah, SH, MH yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim diangkat dalam jabatan baru sebagai Paurluhkum Subbidsuluhkum Bidkum Polda Bengkulu, digantikan oleh Iptu Welliwanto Malau, S.IK yang sebelumnya Kasat Narkoba Polres Bengkulu Selatan.

Selanjutnya, AKP Eka Chandra, SH, MH yang menjabat Kabag Ops diangkat dalam jabatan baru sebagai Paur 2 Siaga SPKT II SPKT Polda Bengkulu, dan digantikan oleh AKP Dedi Kusnadi, SH dari Kabagsumda Polres Mukomuko.

Berikutnya AKP Syamsul Rizal yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Sabhara diangkat dalam jabatan baru sebagai Kaurmintu Subbagrenmin Polda Bengkulu, dan posisinya digantikan oleh AKP Krisman Dodi Sitorus SH dari Subdit Binsatpam/Polsis Ditbinmas Polda Bengkulu.

Selanjutnya, Iptu Joko Triyanto, S.Sos sebelumnya Kapolsek Ujan Mas diangkat dalam jabatan baru sebagai Pamin 3 Subbagrenmin Rorena Polda Bengkulu, digantikan Iptu Teguh Prasetyo, S.TRK yang sebelumnya Kapolsek Lebong Atas. Dan, Ipda Nurmansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Kasipropam Polres Kepahiang, diangkat dalam jabatan baru sebagai Pamin 7 Kasubagrenmin Bidhumas Polda Bengkulu.

Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Drs. Teguh Sarwono, M.Si melalui Kabid Humas AKBP Sudarno, S.Sos membenarkan perihal mutasi Pamen dan Pama di jajaran Polda Bengkulu tersebut, khususnya Pama di jajaran Polres Kepahiang. Menurutnya, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal lumrah dalam institusi Polri, guna meningkatkan kinerja lembaga.

"Mutasi ini rutin dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi dan pembinaan karier personel. Dengan mutasi ini diharapkan kedepan terjadi peningkatan kinerja dari lembaga, khususnya jajaran Polda Bengkulu," jelas Sudarno.**(sly)**

Baru Dua Desa Ajukan Tahap III

KEPAHIANG – Dari 105 desa yang ada di Kabupaten Kepahiang, hingga saat ini baru ada 2 desa yang telah mengajukan pencairan Dana Desa (DD) tahap III ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kepahiang. Kedua desa tersebut yakni Desa Sosokan Baru dan Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu.

Sementara 103 desa lainnya diharapkan dalam waktu dekat ini segera mengajukan pencairan DD tahap III karena saat ini sudah menjelang akhir tahun anggaran 2020. Kepala Dinas PMD Kepahiang, Ir. Ris Irianto mengatakan selain 2 desa tersebut, saat ini juga sudah ada 2 desa yang melakukan konsultasi terkait pengajuan pencairan DD tahap III, yakni Desa Sosokan Taba, Kecamatan Muara Kemumu, dan Desa Talang Gelompok, Kecamatan Seberang Musi.

"Kedua desa belum mendapatkan rekomendasi dari camat untuk pencairan DD tahap III, karena masih ada beberapa dokumen terkait laporan penggunaan DD tahap I dan II yang masih harus dilengkapi," beber Ris Irianto.

Kendati demikian, Ris Irianto mengimbau kepada seluruh desa yang belum mengajukan pencairan DD tahap III agar bisa segera menyampaikan usulannya. Karena dikhawatirkan akan terlambat mendapatkan pencairan jika hingga akhir bulan ini belum menyampaikan usulan. "Nanti kalau terlambat pasti akan disanksi. Sanksinya yakni akan ada pengurangan jumlah DD yang diterima untuk tahun anggaran yang akan datang," ujarnya.

Ketika ditanya soal deadline usulan, Ris Irianto mengatakan tidak ada batas waktu untuk pengajuan usulan pencairan DD tahap III. Hanya saja ia menegaskan untuk laporan akhir penyusunan SPj, ditunggu paling lambat pertengahan bulan Desember mendatang.

"Sejauh ini untuk realisasi pekerjaan yang dialokasikan DD di seluruh desa yang ada di Kabupaten Kepahiang sudah 90 persen lebih. Hanya saja untuk pencairan hasil dari pekerjaan itu perlu SPj. Dan, SPj ini yang dibutuhkan untuk laporan akhir, baik tahap I, tahap II dan tahap III atau minimal SPj masuk sebanyak 75 persen," jelas Ris Irianto. **(sly)**

Butuh PPLHD dan PPNS

Untuk Penanganan Perkara Lingkungan

KEPAHIANG – Hingga saat ini Kabupaten Kepahiang belum memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan hidup yang bertugas menangani berbagai persoalan lingkungan hidup di daerah. Hal ini diakui Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepahiang, Mukhtar Yatib, S.Pd.

Ia mengatakan peran keduanya sangat penting dalam menangani berbagai kasus pelanggaran lingkungan hidup ke ranah hukum. Khusus PPLHD bertugas sebagai saksi ahli yang mengetahui teknis pelanggaran di lapangan terkait persoalan lingkungan hidup. Sementara PPNS bertugas melakukan penyidikan di bidang lingkungan hidup untuk menindak pelanggaran di bidang lingkungan hidup.

"Hingga saat ini kita baru memiliki sumber daya manusia di bidang kerja saja, yang bertugas melakukan pengawasan administratif, seperti izin lingkungan, dan UKL/UPL. Sementara untuk PPLHD dan PPNS masih kita ajukan bimbingan teknisnya ke KLHK. Namun dengan catatan khususnya tidak bisa dipindahtugaskan atau dimutasi dalam jangka waktu tertentu," terang Mukhtar.

Minimnya pejabat tersebut, sambung Mukhtar, mengakibatkan berbagai kasus pelanggaran lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Kepahiang selama ini sulit dibawa ke ranah hukum. Pihaknya hanya memberi sanksi administrasi sembari terus melakukan pembinaan terhadap perusahaan pelanggar aturan lingkungan hidup.

"Dinas LH saat ini baru memiliki Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, kita mengintensifkan pengawasan. Khususnya aktivitas industri melalui penilaian kinerja terhadap penataan lingkungan," tutup Mukhtar.**(sly)**

DIKONTRAK RUMAH
Type 90 Lantai Granit Marmer Air Sumur Boor, Kamar Mandi di Kamar Utama, Plafond Gipsun Minimalis, Carport, Plafon Gipsun Lokasi Strategis di Kota Bengkulu JL Sungai Rupat 1 Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Hubungi Telp/WA 0823 7172 8128, 0822 7980 5330

JUAL TANAH/RUMAH
Luas Tanah 634 M2, SHM, Rumah Fas : 3 Kmr Tidur, 1 R. Tamu, 1 R. Tv/Keluarga, 2 Teras Muka dan Belakang, 1 R. Makan, 2 K. Mandi, 1 R. Masak Tanah Sudah Dipagar Keliling, Pagar Besi dan Tembok Alamat : Jl. Kapuas 3 Dalam Rw. 05/ Rt. 17 No. 34 Kel. Padang Harapan Bkl Hubungi :
0878 9496 1917
0819 1931 8688
(Berminat silahkan cek lokasi)

DIJUAL/ DIKONTRAKAN RUKO
Ruko 4 Pintu, (2 Lantai + Basement) Ukuran 4 x 16, Sumur Gali, Listrik 1.300 per pintu, Bangunan Kokoh JL. WR Supratman (Jl Raya Bentiring) Hubungi Telp/WA
0823 7172 8128,
0822 7980 5330

Kejar Pembahasan Raperda APBD 2021

KEPAHIANG – DPRD Kepahiang telah selesai melakukan pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait RAPBD 2021. Ke depannya dewan akan mulai melakukan pembahasan raperda APBD 2021 yang rencananya akan mulai dibahas besok pagi.

Wakil Ketua I Andrian Defandra, M.Si mengatakan pembahasan Raperda APBD 2021 lebih cepat dari yang diprediksi sebelumnya, mengingat Pemkab dan DPRD mengejar keterlambatan yang sanksi administratifnya adalah penundaan keuangan daerah hingga sanksi administratif bagi Banggar dan TAPD.

"Pengesahan RAPBD 2021 diagendakan Selasa pekan ini, pembahasan anggaran sudah dilakukan oleh Banggar dan TAPD agar jangan sampai daerah dan DPRD mendapatkan sanksi akibat keterlambatan itu," jelas Aan, sapaan akrabnya.

Menurut Aan, pasca pengesahan RAPD nantinya, pihaknya akan segera menyampaikan hasilnya kepada Pemprov Bengkulu untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan. "Pengesahan RAPBD 2021 ini paling lambat 30 November mendatang. Namun masih ada tahapan evaluasi dari pemprov, pembahasan kembali di tingkat Banggar dan TAPD, dan kemudian baru bisa kita laksanakan hasilnya. Memang kita kejar cepat, karena sistem keuangan daerah kita sudah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)," jelas Aan.

Untuk diketahui, proyeksi RAPBD Kabupaten Kepahiang TA 2021 yakni Pendapatan daerah Rp 631.140.856.082 Belanja daerah Rp 801.299.445.108, Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 5.000.000.000 dan pengeluaran pembiayaan Rp 47.298.442.492, sehingga pembiayaan netto menjadi Rp 42.298.442.492. **(sly)**

TELEPON PENTING

Call Center Polsek Karang Tinggi :

Perwira PengHubung	:	081278617339
RSUD Benteng	:	081368965552
Pos A Nakau	:	085279125960
Pos B Meringgi Sakti	:	085279125930

Tagihan BPJS Kesehatan Belum Cair

BENTENG - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) mengalami kendala terkait klaim biaya pengobatan ke BPJS Kesehatan. Untuk diketahui hingga saat ini sudah mencapai ratusan juta rupiah. Yang merupakan biaya pengobatan dari pasien jaminan BPJS yang masih dipending. Alasannya masih dalam tahap verifikasi oleh tim BPJS.

Direktur RSUD Benteng, dr. Listikarini Hillen Widiastuti mengatakan, kalau terdapat sekitar ratusan juta biaya pengobatan di rumah sakit yang belum dapat diklaim ke BPJS kesehatan. Adapun nominal mencapai ratusan juta tersebut bervariasi dari biaya rawat inap, rawat jalan, IGD dan sejumlah operasi.

"Dalam kita untuk melakukan klaim BPJS cukup sulit. Terkadang dari 100 persen biaya yang diajukan untuk pencairan, hanya 50 persennya dana yang didapatkan dalam pencairan tersebut. Untuk sisanya dipending dengan alasan masih diverifikasi, dan sebagainya" ungkapnya.

Dia menambahkan, kalaupun dana cair, pihaknya harus menunggu kurang lebih waktu hingga 3 bulan. Kalau ditanyakan mengapa dalam proses pencairan terlalu lambat pihak BPJS Kesehatan mengatakan Beberapa alasan lambatnya verifikasi diantaranya pembahasan di tingkat kabupaten dan dilanjutkan ke tingkat cabang di provinsi.

"Lebih banyak mereka menilai layak atau tidak ajuan BPJS tersebut terhadap suatu pembiayaan. Kalau ditingkat kabupaten masih ada keraguan penentuan, mereka harus koordinasi ke cabang," ungkap Hillen.

Lanjut Hillen, dengan kendala yang pihak RSUD alami dalam kla biaya BPJS ini berdampak terhadap hak untuk dokter spesialis yang sudah menjalankan tugas tak dapat diberikan tepat waktu. Harapannya ini dapat dipertimbangkan.

"Dokter spesialis sudah melakukan kewajibannya. Tapi hak mereka belum dapat terpenuhi," demikian Hillen. **(jee)**

Terduga Pelaku Curanmor Diamankan Massa

BENTENG - Warga Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa kemarin (15/11) sekitar pukul 13.30 WIB mengamankan Ag (35) warga Betungan Kota Bengkulu. Ag ini diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berupa 1 unit mobil pick up milik warga Kota Bengkulu.

Usai diamankan massa, terduga pelaku sempat dibawa polisi ke Polsek Pondok Kelapa dan kemudian diserahkan ke Polsek Selebar lantaran Tempat Lokasi Kejadian (TKP) di Kota Bengkulu.

Kapolres Bengkulu Tengah (Benteng), AKBP. Ary Baroto, S.Ik melalui Kasat Reskrim, Iman Falucky, MH membenarkan adanya kejadian tersebut. Diketahui jika terduga pelaku sebelumnya telah dilakukan pengejaran terlebih dahulu oleh massa dari Kota Bengkulu. Sembari dilakukan pengembangan oleh polisi dari Polsek Pondok Kelapa dan Polsek Selebar, akhirnya dapat dihadang di kawasan Desa Pondok Kelapa.

"Info yang kita terima ada pengejaran terduga pelaku curanmor. Bisa dihentikan di kawasan Kecamatan Pondok Kelapa oleh massa. Sempat diintrograsi dan akhirnya diserahkan ke Polsek Selebar," pungkas Iman. **(jee)**

JERI/RB

PENILAIAN: Para petugas medis saat melakukan penilaian tahap kedua terhadap sekolah untuk persiapan KBM tatap muka.

Hari Ini, 59 Sekolah Mulai KBM Tatap Muka

BENTENG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Rabu lalu (11/11) sudah mengeluarkan surat rekomendasi bagi 59 sekolah untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka tahap kedua. Yang akan dimulai per Senin (16/11). Dengan tambahan 59 sekolah ini, total ada 122 sekolah yang menggelar KBM tatap muka di Benteng.

Kepala Dinas Dikbud Benteng, Saidirmam, SE, MM melalui Kepala Bidang (Kabid) SMP Dikbud Benteng, Edon Siregar, S.Pd, menjelaskan, 59 sekolah ini sudah diperbolehkan melaksanakan KBM tatap muka. Berdasarkan penilaian kesiapan sekolah oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).

"Maka dari penilaian yang dilakukan oleh Dinkes tersebut ada 59 sekolah yang dinilai layak untuk melaksanakan KBM tatap muka, yang terdiri dari 12 SMP dan 47 SD. Sehingga total keseluruhan sekarang ada 122 sekolah yang sudah KBM tatap muka, yang terdiri dari 90 SD dan 32 SMP yang sudah melaksanakan KBM tatap muka," ungkapnya.

Dia menambahkan, dengan diperbolehkannya 59 ini KBM tatap muka, maka mereka sudah memulai KBM tatap mula di sekolah pada hari ini. Meskipun sudah diperbolehkan tatap muka Dikbud selalu mengingatkan kepada 122 sekolah untuk menerapkan semua prokes yang sudah ditetapkan. Jangan hanya saat penilaian saja akan tetapi pada saat praktek di lapangan juga harus dilaksanakan.

"Sebab, apabila dalam pelaksanaan KBM tatap muka yang digelar terdapat warga sekolah yang terpapar Covid-19, baik itu guru dan siswa. Maka satuan pendidikan wajib menutup kembali sekolah tersebut dan ini tidak bisa ditawar. Sekolah tersebut bisa dibuka kembali setelah situasi sudah dianggap normal oleh tim gugus tugas Covid-19 Benteng," tegasnya.

Lanjutnya, Bagi sekolah yang sudah diberikan izin untuk melakukan KBM tatap muka, untuk menyiapkan surat pemberian izin yang ditandatangani oleh orangtua siswa. Sebagai bukti kalau orangtua siswa menyetujui kalau anaknya mengikuti KBM tatap muka di sekolah. Kemudian menyiapkan titik penjemputan dan penurunan siswa agar tidak terjadi penumpukkan.

"Tidak diperkenan membuka kantin, meniadakan tempat bermain atau berkumpul dan sebagainya. sekolah harus menyiapkan petugas pengukur suhu didepan pintu gerbang sekolah, menyiapkan tempat cuci tangan di gerbang masuk sekolah dan depan kelas. Menyiapkan masker cadangan bagi siswa, menyiapkan dukungan UKS beserta tenaga medisnya, membentuk satgas Covid-19 di sekolah dan menyiapkan media informasi tentang Covid-19," jelasnya.

Untuk diketahui, inilah 122 sekolah yang sudah melaksanakan KBM tatap muka. Pada tahap pertama terdiri SMPN 1, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 10, SMPN 12, SMPN 14, SMPN 15, SMPN 21, SMPN 22, SMPN 23, SMPN 24, SMPN 25, SMPN 27, SMPN 28, SMPN 30, SMPN 31, SMPN 32. Tahap kedua SMPN 2, SMPN 3, SMPN 6, SMPN 11, SMPN 13, SMPN 16, SMPN 17, SMPN 18, SMPN 19, SMPN 20, SMPN 26 dan SMPN 29.

Untuk tingkatan SD, pada tahap pertama terdiri dari, SD 1, SDN 4, SDN 7, SDN 8, SDN 10, SDN 11, SDN 13, SDN 16, SDN 18, SDN 19, SDN 20, SDN 23, SDN 28, SDN 31, SDN 32, SDN , SDN 33, SDN 37, SDN 38, SDN 39, SDN 40, SDN 42, SDN 43, SDN 46, SDN 50, SDN 51, SDN 54, SDN 55, SDN 56, SDN 58, SDN 60, SDN 61, SDN 63, SDN 66, SDN 70, SDN 72, SDN 76, SDN 78, SDN 80, SDN 81, SDN 83, SDN 85, SDN 88 dan terakhir SDN Al Ihsan.

Pada tahap kedua SDN 2, SDN 3, SDN 5, SDN 6, SDN 9, SDN 12, SDN 14, SDN 15, SDN 17, SDN 22, SDN 24, SDN 25, SDN 26, SDN 27, SDN 29, SDN 30, SDN 34, SDN 35, SDN 36, SDN 41. Kemudian SDN 44, SDN 45, SDN 47, SDN 48, SDN 49, SDN 51, SDN 52, SDN 53, SDN 57, SDN 62, SDN 64, SDN 65, SDN 67, SDN 68, SDN 71, SDN 74, SDN 75, SDN 77, SDN 79, SDN 82, SDN 84, SDN 85, SDN 86, SDN 87, SDN 80, SDN 91 dan terakhir SDN 92. **(jee)**

Buka Jalan Menuju Kabupaten Seluma dan RL

BENTENG - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) optimis dalam mewujudkan pembukaan badan jalan menuju Kabupaten Seluma dan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 mendatang.

Wakil Ketua II DPRD Benteng, Evi Susanti, S.Ip mengatakan, berkenaan dengan rencana untuk membuka jalan menuju Kabupaten Seluma dan Kabupaten ini, TNI sudah melakukan pengukuran lokasi pembukaan badan jalan. Sebab jalan ini direncanakan akan masuk kedalam program Karya Bhakti TNI berupa TMMD.

"Untuk total sementara, jumlah keseluruhan panjang jalan menuju dua Kabupaten ini mencapai 18 KM namun jumlah terdebut bisa berubah. Untuk jalan menuju Kabupaten Rejang Lebong, mulai dari akses jalan di Kecamatan Bang Haji menuju Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong," jelasnya.

Dia menambahkan, sedangkan untuk menuju Kabupaten Seluma, mulai dari akses di Kecamatan Semidang Lagan menuju Kabupaten Seluma. Kemudian target pengerjaan jalan menuju dua Kabupaten ini akan dikerjakan mulai tahun anggaran 2021 mendatang. Untuk anggaran masih dalam tahap pembahasan dan apabila semuanya sudah selesai, maka di awal tahun sudah dikerjakan pembukaan jalan tersebut

"Pembukaan jalan menuju dua Kabupaten ini agar mempermudah dan memangkas jarak akses masyarakat yang ingin berpergian ke kabupaten tetangga, baik itu ke Kabupaten Seluma maupun ke Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu juga pembukaan jalan ini juga sebagai akses jalan alternatif apabila jalan utama menuju dua Kabupaten ini terisolir, khususnya yang menuju Kabupaten Rejang Lebong yang sering terjadi longsor di daerah liku sembilan," ujarnya.

Di tempat yang berbeda, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Benteng, Edy Hermansyah, P.hD mengatakan, kalau pihaknya beberapa waktu lalu sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten tetangga terkait dengan rencana pembukaan badan jalan. Harapannya akan terjalin kerjasama yang baik dari segi penggunaan akses jalan.

"Kabupaten kita sudah melakukan koordinasi dengan Kabupaten Rejang Lebong terkait rencana kita ini. Alhamdulillah respon dari Pemkab Rejang Lebong, turut mendukung terkait adanya rencana pembukaan jalan. Karena akan ikut berdampak pada masyarakat mereka. Kita berharap semua rencana kita ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa terwujud," tutup Edy. **(jee)**

WTP Minta Ganti Rugi Rp 6 Miliar

BENTENG - Polemik ganti rugi lahan tol Warga Terdampak Pembangunan (WTP) tol yang berada di Desa Jumat hingga saat ini belum selesai. Tidak adanya kesepakatan nilai ganti rugi lahan yang disetujui kedua belah pihak membuat penentuan ganti rugi lahan ini berpeluang besar diselesaikan di pengadilan. Kepala Pertanahan Benteng, Ir. Hazairin Masrie MM mengatakan, salah satu WTP atas nama Tahirman Mukti meminta ganti rugi lahannya sebesar Rp 6 miliar. Mengenai ganti rugi ini Kantor Pertanahan tidak bisa menyetujui. Dikarenakan pihaknya tidak memiliki wewenang dalam menentukan harga ganti rugi tersebut.

"Memang Tahirman Mukti ini sudah menggunakan pengacara saat ini dan sudah meminta ganti rugi lahannya diangka Rp 6 miliar. Tetapi kita tidak bisa menentukan karena tidak memiliki wewenang, semuanya tergantung Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang bisa menentukannya," tegasnya.

Dia menambahkan, kalau untuk hitungan dari KJPP sudah disampaikan ke Tahirman Mukti, tetapi memang yang bersangkutan menolak mengenai nilai ganti rugi yang ditetapkan KJPP. Sehingga permasalahan ini tidak menemui kata sepakat antara Tahirman Mukti dan KJPP dan apabila penentuan nilai ganti rugi ini tetap berlarut-larut seperti ini, maka berpeluang besar akan diselesaikan ke pengadilan.

"Iya sangat berpeluang besar diselesaikan ke pengadilan, karena tidak ada menemui kata sepakat dan sudah berlangsung lama. Karena sebelumnya juga sudah ada penentuan nilai ganti rugi diselesaikan di pengadilan, sehingga apapun keputusan pengadilan nantinya mengenai nilai ganti rugi laham tol, itu harus diterima," ungkapnya.

WTP tol Desa Jumat, Tahirman Mukti menegaskan, kalau ia sudah siap apabila nantinya persoalan penentuan ganti rugi ini nantinya diserahkan ke pengadilan, supaya bisa mendapatkan kepastian. Agar jelas mengenai lahan yang ia miliki dan luas lahan yang ia miliki. Ia juga sudah menyiapkan pengacara mengenai penyelesaian ganti rugi lahan miliknya tersebut.

JERI/RB

LAHAN: Inilah lahan milik warga di Desa Jumat yang belum selesai proses ganti ruginya.

"Saya memiliki bidang tanah total kurang lebih 3,3 hektare, kemudian ditetapkan nilai ganti ruginya hanya sebesar sebesar Rp 2,9 miliar. Sedangkan WTP tol lainnya yang juga terdampak, hanya memiliki lahan seluas 1,6 hektare dengan lokasi yang berdekatan dengan lahan saya, tetapi yang bersangkutan mendapatkan ganti rugi lebih besar dari saya sebesar Rp 3,1 miliar," jelasnya.

Lanjutnya, mengenai nilai ganti rugi lahan miliknya tersebut, ia hanya minta ganti rugi dua kali lipat dari hitungan lahan yang berdampingan dengannya tersebut atau berkisar Rp 6 milliar. "Itu bukan dalam arti menaikan harga, namun memang lahan yang saya miliki tersebut memang dua kali lipat dari yang berdampingan dengan saya tersebut. Harapan saya jangan sampai masyarakat kecil seperti saya ini mau dipermainkan," tutup Tahirman. **(jee)**

Dilantik, 251 PTPS Wajib Rapid Tes

BENTENG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) hari ini (16/11) dijadwalkan melantik 252 Pengawas Tempat Pemungutan Suata (PTPS). Setelah dilantik 251 PTPS wajib untuk menjalani rapid test, semua ini dilakukan karena saat ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan dalam suasana bencana non alam Covid 19.

Hal ini diungkapkan langsung oleh, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Benteng, Supirman, S.Ag, MH mengatakan, jika pelaksanaan rapid tes sesuai dengan instruksi dari Bawaslu RI. Dimana seluruh penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu dan jajaran harus dipastikan aman dari Covid-19.

"Makanya harus dilakukan rapid test ini guna memastikan jika tidak ada PTPS yang terpapar Covid-19. Semua yang sudah dilantik harus mengikuti rapid test tanpa terkecuali. Untuk rapid test ini selanjutnya segera kita jadwalkan untuk rapid tes. Kita akan bekerja sama dengam pihak RSUD Benteng dalam melaksanakan rapid test jni" ujarnya.

Dia menambahkan, sementara itu pelaksanaan pelantikan PTPS yang akan digelar hari ini di lokasi yang berbeda-beda, di setiap sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) masing-masing. Dalam pelantikan pihaknya menekankan untuk memperketat protokol kesehatan (prokes). **(jee)**

INFO HOTEL

HOTEL	ALAMAT	TELPON / FAX/ HP
LATANSA / SYARIAH	Jl. Tribrata No. 42 Kel. Cempaka Permai (Simpang 4 Polda)	(0736) 52549 / 0812 7103 8847
THE MADELINE	JL. Bakti Husada No. 88 Kel Lingkar Barat	(0736) 52777 / 08117861940
SANTIKA	JL. Raya jati No 45 Kel. Sawah Lebar Kec Ratu Agung, Bengkulu	(0736) 25858

hakim/rb

BANGKIT BANGSAKU : Gerakan "Bangkit Bangsaku" sebagai gerakan kepedulian kepada sesama, sebagai bentuk gerakan dengan meluaskan aksi-aksi kemanusiaan yang dapat meredam dampak pandemi.

Gerakan Bangkit Bangsaku

Selamatkan Warga dari Dampak Pandemi

BENGKULU- Dampak pandemi Covid-19 yang semakin mencuat, membuat berbagai sektor kehidupan manusia semakin terdampak yakni diantaranya sosial, ekonomi dan kesehatan. Gerakan Bangkit Bangsaku sebagai gerakan kepedulian kepada sesama, sebagai bentuk gerakan dengan meluaskan aksi-aksi kemanusiaan yang dapat meredam dampak pandemi.

Selain berdampak negatif terhadap sektor kesehatan, pandemi ini juga menekan pertumbuhan ekonomi masyarakat diantaranya banyak UMKM yang gulung tikar karena turunnya daya beli, phk buruh dan karyawan swasta karena perusahaan tak sanggup membayar upah.

Multikrisis yang terjadi saat ini membawa anak bangsa pada jurang depresi nasional, namun optimisme akan kebangkitan bangsa ditengah pandemi terus disuarakan oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sejak pandemi melanda Indonesia pada awal Maret lalu hingga saat ini. Beragam program kemanusiaan dihadirkan oleh ACT untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang melanda nusantara, khususnya Bengkulu.

Sebagai aksi penyelamatan bangsa, ACT kembali meluncurkan sebuah gerakan kebaikan bertajuk Bangkit Bangsaku. Dimana gerakan ini sebelumnya telah digaungkan di beberapa wilayah Indonesia, sedangkan untuk wilayah Bengkulu secara resmi diluncurkan pada bulan Oktober 2020 di Kantor Cabang ACT Bengkulu.

Syamsul Fajri Oktario selaku Kepala Cabang ACT Bengkulu ketika ditemui di sela-sela acara mengatakan Gerakan Bangkit Bangsaku adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh ACT sebagai bentuk respon terhadap kondisi yang dialami bangsa saat ini. "Seperti kita ketahui, pasca masuknya wabah Covid-19 maret lalu ke Indonesia banyak sektor vital yang terdampak, diantaranya sektor kesehatan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. **(hkm)**

LINTAS

1.010 Orang Sembuh Covid-19

BENGKULU – Angka kesembuhan Covid-19 di provinsi Bengkulu saat ini sudah mencapai angka 1.010 pasien, dalam kurun waktu pandemi Covid-19 masuk ke Bengkulu. Dari total kasus yang tercatat saat ini mencapai 1.403 pasien per Minggu (15/11).

Kemarin se-Provinsi Bengkulu diketahui terdapat tambahan sebanyak 11 kasus positif baru. Selain itu, juga ada penambahan sebanyak 2 kasus yang meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Bengkulu, H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes mengatakan dari 201 sampel swab yang hasil pemeriksaannya diterima, diketahui sebanyak 11 sampel diketahui hasilnya positif Covid-19. "Dengan demikian maka total jumlah kasus positif Covid-19 di Provinsi Bengkulu sampai saat ini sebanyak 1.403 kasus," jelas Herwan.

Dipaparkannya, penambahan kasus positif sebanyak 11 kasus, yaitu asal Kota Bengkulu sebanyak 3 kasus dan asal Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 8 ksus (lengkap lihat grafis). "Kami imbau agar masyarakat dapat senantiasa mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 dengan 3 M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir," imbaunya.

Sementara itu, untuk penambahan kasus kasus meninggal sebanyak 2 kasus yakni, Kasus 1392 dari Kabupaten Rejang Lebong dan Kasus 1279 dari Kabupaten Seluma. "Hingga saat ini untuk total kasus meninggal dunia sebanyak 62 orang," demikian Herwan. **(zie)**

TAMBAHAN KASUS SEMBUH:

1. Kasus **1090** : Kota Bengkulu
2. Kasus **1091** : Kota Bengkulu
3. Kasus **1092** : Bengkulu Utara
4. Kasus **1093** : Kota Bengkulu
5. Kasus **1094** : Kota Bengkulu
6. Kasus **1095** : Kota Bengkulu
7. Kasus **1096** : Kota Bengkulu
8. Kasus **1098** : Kepahiang
9. Kasus **1104** : Rejang Lebong
10. Kasus **1117** : Bengkulu Utara
11. Kasus **1143** : Rejang Lebong
12. Kasus **1148** : Rejang Lebong
13. Kasus **1150** : Kota Bengkulu

Total kasus sembuh sebanyak **1.010** ORANG

Permendagri Tentang Pilkades Direvisi

BENGKULU - Pentingnya penerapan protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19 sekarang ini menjadi salah satu alasan terkait dengan rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang disebutkan bakal merevisi Peraturan Mendagri (Permendagri), yang berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Sekdaprov Bengkulu, Drs. Hamka Sabri, M.Si menjelaskan, revisi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Diungkapkan Hamka, perihal rencana revisi diketahui saat pihaknya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama Mendagri, Tito Karnavian dengan pembahasan salah satunya soal pelaksanaan Pilkades di tengah pandemi Covid-19. "Seperti diketahui tahun depan cukup banyak desa-desa yang menggelar Pilkades, termasuk di Bengkulu," kata Hamka.

Lebih lanjut dikatakan, dalam pemaparan rakor tersebut, revisi Permendagri yang di dalamnya terdapat pelaksanaan Pilkades yang tentunya harus menyesuaikan dengam kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini. **(zie)**

Covid-19 Tak Pengaruhi Pendaftaran Haji

BENGKULU – Meskipun di masa Pandemi Covid-19 ini, ternyata tidak memadamkan niat masyarakat Provinsi Bengkulu untuk berangkat haji ke Tanah Suci. Jumlah pendaftar terus bertambah sehingga waiting list (daftar tinggu, red) haji pun semakin lama. Rata-rata waiting list keberangkatan CJH Provinsi Bengkulu menjadi 17 tahun.

Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Bengkulu Drs. H. Zahdi Taher, M.HI melalui Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Drs. H. Ramlan, M.HI, mengatakan waiting list keberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH) Provinsi Bengkulu rata-rata 17 tahun. Terlama di Kota Bengkulu dengan perkiraan keberangkatan 27 tahun kemudian dan tercepat Kabupaten Kaur dengan waiting list 12 tahun, jika mendaftar per Oktober lalu.

"Jumlah waiting list Provinsi Bengkulu saat ini sudah 29.043 jiwa, dan sejak masa pandemi Covid-19 di mulai hingga Oktober pendaftar haji selalu ada dari kabupaten/kota. Jumlahnya ratusan perbulannya," kata Ramlan kepada **RB**, kemarin.

Berdasarkan data daru Siskohat Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu per 31 Oktober, sambung Ramlan, untuk Kota Bengkulu saat ini jumlah daftar tunggu haji sebanyak 8.235 CJH, Kabupaten Bengkulu Utara ada 3.010 CJH, Bengkulu Selatan ada 2.337 CJH, Rejang Lebong sebanyak 4.325 CJH, Mukomuko ada 2.807 CJH, Seluma sebanyak 2.199 CJH, Kaur ada 1.270 CJH, Kepahiang sebanyak 2.061 CJH, Lebong ada 1.367 CJH, dan Bengkulu Tengah 1.432 CJH.

"Kuota keberangkatan Provinsi Bengkulu masih 1.636, dengan kuota ini maka rata-rata waiting list Provinsi Bengkulu mencapai 17 tahun kedepan," terang Ramlan.

Ramlan menambahkan, tahun ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 keberangkatan untuk ibadah haji ditiadakan. Sehingga apabila tahun depan ibadah haji dibuka kembali maka Jemaah Calon Haji (JCH) yang sudah melakukan pelunasan tahun ini menjadi prioritas yang akan diberangkatan ke Tanah Suci.

"Sampai saat ini belum informasi terbaru soal dilaksanakan atau tidaknya ibadah haji tahun depan. Kalau ada, dari kita sudah siap karena pelunasan sudah dilakukan tahun ini," demikian Ramlan. **(key)**

Peran Guru di Masa Pandemi Covid-19

BENGKULU- Pandemi Covid-19 masih menjadi kendala semua negara. Terlebih bagi dunia pendidikan, karena pandemi kegiatan belajar mengajar kini dilakukan secara daring. Namun, pemerintah kota berupaya agar KBM tetap bejalan meski dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pendidikan tetap jadi fokus utama pemerintah dalam masa pandemi.

Kepala Bidang Kebudayaan Diknas Kota Bengkulu Martina Nengsih mengatakan, Dalam situasi luar biasa ini, guru kini memiliki dan dituntut melaksanakan banyak peran tambahan. Salah satunya memastikan tercapainya tujuan pendidikan dan pemenuhan target akademik dan non akademik. "Mempersiapkan materi dan hasil evaluasi pembelajaran serta memberikan penguatan aktif dan memberikan pemahaman kepada siswa guna mentaati semua protokol kesehatan,"katanya.

Ia juga mengatakan, dengan tetap memprioritaskan fasilitasi terhadap pembelajaran siswa, guru kini harus senantiasa memberikan dukungan emosional bagi siswa, orang tua, dan juga keluarga. "Guru harus dapat melakukan komunikasi dan mengembangkan kerja sama yang baik dengan kepala sekolah, orang tua/keluarga siswa untuk membangun kepercayaan dan mendukung proses pendidikan,"jelasnya. Guru dituntut untuk memberikan pembelajaran yang menarik, menantang, dan dapat menemukan pemahaman yang utuh terhadap mata pelajaran yang diampu. Tugas guru tidak hanya sekedar mengajar, namun juga membimbing, melatih, dan mendidik. "Oleh karena itu guru harus memiliki kompetensi yang mumpuni baik kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian," paparnya.**(hkm)**

MARTINA NENGSIH

Pengelola Hotel Jangan Abai Protokol Kesehatan

BENGKULU - Masa pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. Maka dari itu, hendaknya agar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah senantiasa dipatuhi.

Termasuk juga di sektor pariwisata, para pengelola hotel dan restoran di Bengkulu diingatkan agar tidak abai untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut. Ini seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Bengkulu, Irsan Setiawan, SH, MM, Minggu (15/11). "Kami dari pemerintah mengimbau kepada pengelola hotel agar jangan abai dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19," jelas Irsan.

Dikatakannya, pihaknya tentunya menginginkan agar pariwisata di Bengkulu terus berjalan sehingga menunjang berputarnya perekonomian di Bengkulu. Namun, dimasa pandemi Covid-19 hendaknya protokol kesehatan tetap jangan diabaikan. "Kita inginkan pariwisata kita tetap berjalan dengan baik, wisatawan juga kita aman dan perekonomian di Bengkulu juga berjalan," jelas Irsan.

Dengan keterlibatan berbagai pihak ini, diharapkan pandemi Covid-19 tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. **(zie)**

Patuhi Prokes Saat Kampanye

BENGKULU – Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diingatkan untuk mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) pada saat melaksanakan kampanye. Penerapan prokes ini diawasi juga oleh Bawaslu sebagai antisipasi pelanggaran.

Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Divisi Pengawasan, Patimah Siregar, S. Pd M. Pd, mengatakan, bawaslu memantau setiap kampanye termasuk penerapan prokes pada saat pelaksanaan kampanye. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran. "Kampanye paslon ini harus sesuai dengan PKPU Nomor 11. Seperti harus ada izin dari pihak keamanan, dan juga menerapkan protokol kesehatan," ujar Patimah.

Saat ini, sambung Patimah, kampanye dialogis atau pertemuan langsung yang paling banyak dilakukan paslin pada masa kampanye ini, Kampanye langsung ini memang itu bisa dilakukan, dengan syarat jumlah peserta terbatas, Paslon pun wajib menerapkan protokol kesehatan penanganan dan pencegahan Covid-19. Dari pantauan pihaknya, masih terdapat temuan pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye.

Sehingga Patimah sendiri menyarankan agar metode daring layak digunakan dalam kampanye untuk mengantisipasi adanya pelanggaran terhadap protokol kesehatan. "Kampanye terbatas itu kan maksimal 50 orang, dan kita harapkan juga agar dalam kampanye dapat menggunakan metode daring saja," tambah Patimah. **(key)**

Kebijakan Covid-19 Jadi Tolok Ukur Pilihan Masyarakat

BENGKULU - Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bengkulu tak lama lagi akan digelar. Tepatnya pada 9 Desember 2020 mendatang, banyak hal yang akan dinilai masyarakat hingga akhirnya menentukan pilihannya.

Salah satunya berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19 yang saat ini menjadi pandemi. Pengamat politik, Azhar Marwan mengatakan kebijakan dalam penanganan baik sisi anggaran maupun peruntukkan anggaran akan menjadi penilaian bagi masyarakat. "Termasuk penilaian dalam menangani kasus pandemi covid 19, masyarakat bisa melihat siapa kepala daerah yang sungguh-sungguh. Baik dari sisi kebijakan anggaran maupun peruntukan anggarannya yang dirasakan oleh masyarakat. Kesungguhan itu bisa juga dinilai dari angka penambahan kasus maupun penanganan kasus Covid-19 di wilayah pemerintahannya," jelas Marwan.

Lebih jauh dia memaparkan, kebetulan para paslon yang bertarung sekarang ini merupakan pejabat daerah dan mantan pejabat daerah yang sudah malang melintang di dunia pemerintahan maupun dunia politik. Maka penilaian masyarakat untuk menentukan pilihan tidak lagi sulit. Tinggal melihat rekam jejak atau jejak digital mereka selama menjabat serta mengelola dunia pemerintahan selama ini. "Oleh karena itu, siapa sebetulnya yang paling sungguh-sungguh dan paling peduli yang dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.**(zie)**